



LKIP 2025

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)



Kementerian Perhubungan RI
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
BPTD Kelas III Kalimantan Utara





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Kalimantan Utara Tahun 2026

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Kalimantan Utara
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	1. Valka Ramdani Himawan, S.Tr.T	Pengawas Transportasi Darat	19/1/2026	
		2. Radetya Putri, A.Md. Tra	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	19/1/2026	
		3. Raya Surya Saputro, A.Md. Tra	Petugas Transportasi Darat	19/1/2026	
		4. Ni Komang Purnama Dewi A.ma PKB	Penguji Kendaraan Bermotor - Terampil	19/1/2026	
2.	Diperiksa	Iwan Sarwoko, S.SiT., M.T.	Kepala Balai	19/1/26	



KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA



Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi

kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 serta revisinya. Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Tanjung Selor, Januari 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara



IWAN SARWOKO, S.SiT., MT.
NIP. 197604101998031006



RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming melanjutkan Kepemimpinannya melalui Kabinet Merah Putih periode Tahun 2025 - 2029 mengusung Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”.

Visi tersebut akan diwujudkan dalam 8 Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam RPJMN periode 2025-2029. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung terwujudnya visi

Presiden Republik Indonesia 2025-2029, yaitu: Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya organisasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2025, ditetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Triwulan IV tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara sudah cukup baik. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK adalah sebagai berikut :

1. Persentase layanan angkutan jalan perintis terealisasi sebesar 99,99% dari Target PK 90%;
2. Persentase Jumlah Simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda sebesar 100% (Target 1 Lokasi);
3. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 84,65% (Target 90%);
4. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 100% (Target 11 lokasi);
5. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 104% (Target 90%);
6. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0% (Target 100 orang);

7. Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar 49,96% (Target 80%);
8. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 29,23% (Target 100);
9. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 89,2% (Target 100).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I LATAR BELAKANG	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
I.3 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	4
I.4 Sistematika Laporan.....	6
BAB II URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS.....	10
II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	10
II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
III.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA.....	19
III.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	19
A. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi.....	24
B. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat.....	45
C. Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	55
D. Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel....	60
III.3 REALISASI ANGGARAN.....	62
III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025	62
III.3.2. Refocussing Anggaran Tahun 2025.....	63
III.3.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran.....	69
III.3.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja.....	69
III.3.5 Hambatan dan Kendala.....	71
BAB IV Penutup.....	73
IV.1 Penutup.....	73
IV.2 Ringkasan Capaian.....	73
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara .4	
Tabel II. 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025.....	11
Tabel II. 2 Uraian Rencana Strategis.....	12
Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja Awal Tahunan Tahun 2025.....	14
Tabel II. 4 Rincian Anggaran Perjanjian Kinerja Awal Tahunan Tahun 2025	14
Tabel II. 5 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15
Tabel II. 6 Rincian Anggaran Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
Tabel II. 7 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
Tabel II. 8 Rincian Anggaran Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
Tabel III. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara .23	
Tabel III. 2 Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	26
Tabel III. 3 Progres Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Triwulan IV Tahun 2025	28
Tabel III. 4 Jumlah Rit Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Triwulan IV Tahun 2025	30
Tabel III. 5 Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	32
Tabel III. 6 Progres Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Triwulan IV Tahun 2025	34
Tabel III. 7 Jumlah Rit Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Triwulan IV Tahun 2025	35
Tabel III. 8 Lintasan Angkutan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.....	37
Tabel III. 9 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2025.....	64
Tabel III. 10 Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2025.....	65
Tabel III. 11 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2025.....	66
Tabel III. 12 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2025.....	68
Tabel III. 13 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025	69
Tabel III. 14 Rincian sisa Anggaran Tahun 2025	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara	2
Gambar III. 2 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025	25
Gambar III. 3 Grafik Capaian IKK Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	31
Gambar III. 4 Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	37
Gambar III. 5 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	41
Gambar III. 6 Grafik Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal	46
Gambar III. 7 Grafik Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	49
Gambar III. 8 Grafik Persentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor	52
Gambar III. 9 Capaian Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025.	57
Gambar III. 10 Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara.....	60
Gambar III. 11 Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Renaksi Tahun 2025	78
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja tahun 2025	79
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Revisi I	83
Lampiran 4 Perjanjian Kinerja Revisi II	89
Lampiran 5 Monev Renaksi 2025.....	93

BAB 1



PENDAHULUAN



ditjen_hubdat



hubdat151



Ditjen Perhubungan Darat



hubdat.dephub.go.id



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

BAB I LATAR BELAKANG

I.1 Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat dituntut menjadi unit pelaksana yang melakukan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta menyelenggarakan manajemen perencanaan, program, anggaran, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan di satuan pelayanan masing – masing hingga evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Sebagai salah satu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara merupakan salah satu UPT dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mendukung tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kelas III Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap Pelabuhan Penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan penyeberangan. Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan terminal Tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan Pelabuhan Sungai, danau, penyeberangan;
3. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran Sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, Sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan Masyarakat; dan
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

A. Bagan Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :



Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

B. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Balai dan Kelompok Jabatan

Adapun tugas Kepala BPTD Kelas III Kalimantan Utara sebagai berikut:

1. Menyusun rencana, program, dan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB);
3. Melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan;
4. Melaksanakan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional;
5. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
6. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
7. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
8. Melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
9. Melaksanakan penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
10. Melaksanakan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;

11. Mengelola urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat;

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara 88 Pegawai (PNS, PPPK, dan PPPK PARUH WAKTU) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Kantor Induk Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara	61
2.	Wilayah Kerja Pelabuhan Tanjung Selor	4
3.	Wilayah Kerja Pelabuhan Tarakan	7
4.	Wilayah Kerja Pelabuhan Nunukan	5
5.	Wilayah Kerja Pelabuhan Sebatik	2
6.	Wilayah Kerja Pelabuhan Tana Tidung	3
7.	Wilayah Kerja Pulau Bunyu	3
8.	Wilayah Kerja Malinau Kota	3

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara

Pada tahun 2025, telah adanya mutasi pegawai sebagai bagian dari upaya organisasi dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta optimalisasi kinerja sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan mutasi tersebut, yang semula pegawai BPTD Kelas III Kalimantan Utara Berjumlah **94 (sembilan puluh empat)** menjadi **88 (Delapan Puluh Delapan)** dan terdapat sebanyak **6 (enam) orang pegawai** yang mengalami perpindahan tugas dan/atau jabatan.

I.3 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

A. Kewenangan



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

3. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

B. Sumber Daya Manusia

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 6 Tahun 2023, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dalam rangka pelaksanaan tupoksi agar dapat dilaksanakan dengan baik.

C. Anggaran



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Pagu Awal BPTD Kelas III Kalimantan Utara Sejumlah Rp. 81.065.404.000 dan Pagu Akhir 80.647.405.000 Sesuai dengan perjanjian kinerja 2025.

D. Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara adalah:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Perintis Penyeberangan;
2. Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Perintis Jalan;
3. Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Perintis Barang;
4. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Wilayah Kalimantan Utara;
5. Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan;
6. Pengadaan *Local Port Service* (LPS)
7. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
8. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
9. Pembinaan terhadap ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
10. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I.4 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

- **Bagan Struktur Organisasi**

I.3 Sumber Daya Manusia

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

I.5 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

- **Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025**

II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

- **Uraian Perjanjian Kinerja 2025**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

A. SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

A.1. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

- A.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B. SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

- **Uraian Sasaran Program**

B.1. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP

- B.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- B.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C. SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

- **Uraian Sasaran Program**

C.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

C.1.1. Definisi Indikator Kinerja

C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.3. IKK 3.4 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

C.3.1. Definisi Indikator Kinerja

C.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

C.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

C.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

D. SK5 Meningkatnya Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

• Uraian Sasaran Program

D.1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

D.1.1. Definisi Indikator Kinerja

D.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

D.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

D.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

E. SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

• Uraian Sasaran Program

E.1. IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

E.1.1. Definisi Indikator Kinerja

E.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

E.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

E.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

III.3 Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

• Pagu Anggaran



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

- **Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025**
- **Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025**
- **Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran**
- **Refocusing Anggaran Tahun 2025**
- **Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025**
- **Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025**
- **Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025**
- **Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025**

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

- **Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025**
- **Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025**
- **Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025**
- **Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja**

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.4. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup

IV.1.1 Ringkasan Capaian

IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025;
6. Draft Laporan Kegiatan Instansi Pemerintah Tahun 2025;
7. Lain – lain yang dianggap perlu.

BAB 2



PERENCANAAN KINERJA



ditjen_hubdat



hubdat151



Ditjen Perhubungan Darat



hubdat.dephub.go.id



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

BAB II

URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dalam kurun waktu 2025 - 2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja utama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut ini :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN
(1)	(2)	(3)		(4)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	Nilai
		IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Nilai
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	Nilai
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Beroperasi	Nilai
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Nilai
		IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Nilai
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Nilai



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN
(1)	(2)	(3)		(4)
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Pehubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai

Tabel II. 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025

A. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara merupakan penjabaran dari sasaran kegiatan yang ingin dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan, satuan dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2025. Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara, Rencana Kinerja Tahunan awal (RKT) berisi 4 (empat) Sasaran Kegiatan, 9 (sembilan) indikator kegiatan dan targetnya masing-masing.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	90
		IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	90



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Beroperasi	Lokasi	11
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90
		IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	100
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Pehubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Tabel II. 2 Uraian Rencana Strategis

II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara melalui Program Penyelenggaraan dan



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran diawal adalah Rp. 81.065.404.000,- adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	90
		IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	90
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Beroperasi	Lokasi	11
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90
		IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	100
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Pehubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp	34.789.195.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp	1.985.760.000



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp	27.335.420.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp	4.101.000.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp	6.208.439.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp	6.645.590.000
Total		Rp	81.065.404.000

Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja Awal Tahunan Tahun 2025

A. Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Adanya pergantian Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara, maka terdapat revisi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pergantian tersebut tidak merubah Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan serta Total Anggaran.

Tabel II. 4 Rincian Anggaran Perjanjian Kinerja Awal Tahunan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	90
		IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	90
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Beroperasi	Lokasi	11



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90
		IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	100
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Pehubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Tabel II. 5 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp	34.789.195.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp	1.985.760.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp	27.335.420.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp	4.101.000.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp	6.208.439.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp	6.645.590.000
Total		Rp	81.065.404.000

Tabel II. 6 Rincian Anggaran Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

B. Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Adanya perubahan pada Indikator Kinerja Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Jalan kepada Masyarakat dari Target 100 (seratus) menjadi 0 (nol), sehingga mempengaruhi anggaran yang sebelumnya sebesar Rp. 81.065.590.000,- menjadi Rp. 80.647.405.000,-.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	90
		IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	90
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Beroperasi	Lokasi	11
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90
		IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	0
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Pehubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Tabel II. 7 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp 28.906.710.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp 1.258.608.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp 29.707.580.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp 5.628.152.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp 8.108.122.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp 7.038.233.000
Total		Rp 80.647.405.000

Tabel II. 8 Rincian Anggaran Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada revisi II Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tersebut yaitu terdapat pengurangan anggaran pada Program Kegiatan nomor 1 (satu) dan 2 (dua) serta penambahan anggaran pada Program Kegiatan 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam).

BAB 3



AKUNTABILITAS KINERJA





DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

III.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

A. Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a) Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b) Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

Kalimantan Utara Tahun 2025

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 Dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara 2025-2029, bermuara pada terwujudnya 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2025-2029.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3			Q4		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi					51,02%			61,77%			74,78%			101,68
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	90	90	3,68	4,08%	90	26,08	28,97%	90	56,71	61,01%	90	99,99%	111%
IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	100%	100%
IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	90	0	0%	90	16,33	18,14%	90	34,37	38,18%	90	84,65%	94,05%
IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%
SK4	Meningkatnya Keselamatan transportasi darat					1,90%			21,39%			25,91			107,46
IKK 3.1	Persentase Perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	90	32,38	35,97%	90	57,76	64,17%	90	69,98	77,75	90	104	115%
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	100	0	0%	100	0	0%	100	0%	0%	0	0	0
IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	80	0	0%	80	0	0%	80	0%	0%	50	49,96	99,92%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					2,08%			6,13%			4,04%			29,23
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100	100	2,08	2,08%	100	6,13	6,13%	100	4,04	4,04%	100	29,23	29,23%
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					26,36%			46,25%			52,99			89,2
IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	100	26,36	26,36%	100	46,25	46,25%	100	52,99	52,99	100	89,2	89,20%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						20,34%			33,88%			39,43%			92%



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025**

Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK100%)	4
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%IKK100%)	4

Tabel III. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Program adalah sebagai berikut:

A. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025.

Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara.

Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Yaitu:

1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan
2. IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda
3. IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
4. IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

a. IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional

a.1 Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.

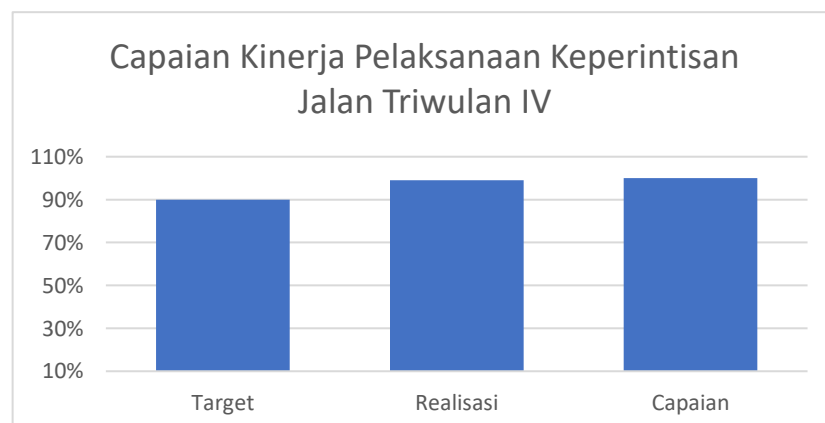
Capaian kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pelaksanaan keperintisan Angkutan Jalan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja terhadap revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional triwulan IV tahun 2025 sebesar 99%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.1 Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional tahun 2025. Berdasarkan laporan progres pelaksanaan penyelenggaraan layanan angkutan jalan perintis mulai menunjukkan kenaikan untuk realisasi setiap trayek yang dilayani hingga bulan desember dengan capaian nilai 99%.



Gambar III. 1 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5647/AJ.501/DRJD/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021, lalu di revisi dalam Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.550/AJ/501/DRJD/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5647/AJ.501/DRJD/2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021, target trayek pelayanan Angkutan Jalan Perintis adalah sebesar 325 trayek.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 90% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang triwulan IV tahun 2025 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2025.

Dari jumlah trayek dalam Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.550/AJ/501/DRJD/2021 sebanyak 325 diantaranya terdapat 5 (lima) trayek di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut :

No	Provinsi	Trayek yang Dilayani
1	2	3
1	Kalimantan Utara	Tanjung Selor – Tideng Pale
2		Malinau – Salang
3		Tanjung Selor – Long Tunggu
4		Tanjung Selor – Mangkupadi
5		KTT - Malinau

Tabel III. 2 Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional antara lain:

- 1) Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan;
- 2) Perencanaan yang matang dalam menentukan trayek yang akan dilayani oleh angkutan perintis tersebut;
- 3) Minat masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan angkutan perintis tersebut;
- 4) Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilih transportasi yang dengan biaya yang terjangkau.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional antara lain:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya angkutan keperintisan
3. Kendala dalam mendapatkan BBM Bersubsidi karena kelangkaan di beberapa wilayah yang dilayani angkutan perintis sehingga harus menggunakan BBM Non-Subsidi
4. Kendala dalam melaksanakan operasional keperintisan di wilayah sirkular dikarenakan adanya penolakan oleh beberapa masyarakat yang memiliki profesi sebagai pengemudi travel
5. Makin maraknya mobil travel ilegal dengan kemudahan aksesnya.
6. Sebagian besar akses jalan menuju daerah yang dijangkau oleh angkutan perintis ini masih rusak dan sulit ditempuh.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

7. Faktor cuaca maupun kondisi geografis dari daerah yang dijangkau angkutan perintis

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Rata-rata Persentase Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Kalimantan Utara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 99% dengan rincian sebagai berikut:

		Trayek					Jumlah
		Tjs - Tideng Pale	Malinau - Salang	Tjs - Long Tunggu	Tjs - Mangkupadi	KTT - Malinau	
Jumlah Trip/ Tahun		24	22	24	24	24	118
Realisasi	Jan	2	0	2	2	2	8
	Feb	2	2	2	2	2	10
	Mar	2	2	2	2	2	10
	Apr	2	2	2	2	2	10
	May	2	2	2	2	2	10
	Jun	2	2	2	2	2	10
	Jul	2	2	2	2	2	10
	Aug	2	2	2	2	2	10
	Sep	2	2	2	2	2	10
	Oct	2	2	2	2	2	10
	Nov	2	2	2	2	2	10
	Dec	2	2	2	2	2	10
	Total	24	22	24	24	24	118
Persentase %		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel III. 3 Progres Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Triwulan IV Tahun 2025

Realisasi Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{118}{118} \times 100\% = 100\%$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu tercapainya target perjalanan pulang pergi (rit) dan kebermanfaatan dalam satu tahun pelayanan. Capaian rit untuk masingmasing trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

		Trayek					Jumlah
		Tjs - Tideng Pale	Malinau - Salang	Tjs - Long Tunggu	Tjs - Mangkupadi	KTT - Malinau	
Jumlah Rit/ Tahun		319.5	317	592.5	591	596	2416
Realisasi (Trit)	Jan	1	0	1	9	9	20
	Feb	11	11	11	11	10.5	54.5
	Mar	30.5	31	31	31	31	154.5
	Apr	30	30	41.5	43.5	38.5	183.5
	May	30.5	31	56	60	62	239.5
	Jun	30	30	59	59	60	238
	Jul	30	31	58	62	60	241
	Aug	31	31	64	63	63	252
	Sep	30	30	62.5	61	62	245.5
	Oct	31	31	64	63	63	252
	Nov	30	30	62	61	63	246
	Dec	32.5	31	66	63	65	257.5
	Total	317.5	317	576	586.5	587	2384
Persentase %		99%	100%	97%	99%	98%	99%



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

Tabel III. 4 Jumlah Rit Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara
Triwulan IV Tahun 2025

$$\% Realisasi = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$\% Realisasi = \frac{2384}{2416} \times 100\% = 99\%$$

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Triwulan IV Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp 4.518.507.000 dengan realisasi Rp. 4.517.973.602 atau mencapai 99,99%.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Kalimantan Utara dengan memperhatikan RPJMN, Renstra, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan.
2. Komitmen antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum.
3. Dapat terus Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam pelayanan jasa angkutan umum.
4. Meningkatkan kualitas layanan dari moda angkutan darat.
5. Dapat terus Mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang handal.
6. Selalu Menciptakan rasa nyaman dan efisiensi terhadap pengguna jasa angkutan umum.
7. Dapat Mewujudkan konektivitas transportasi darat.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

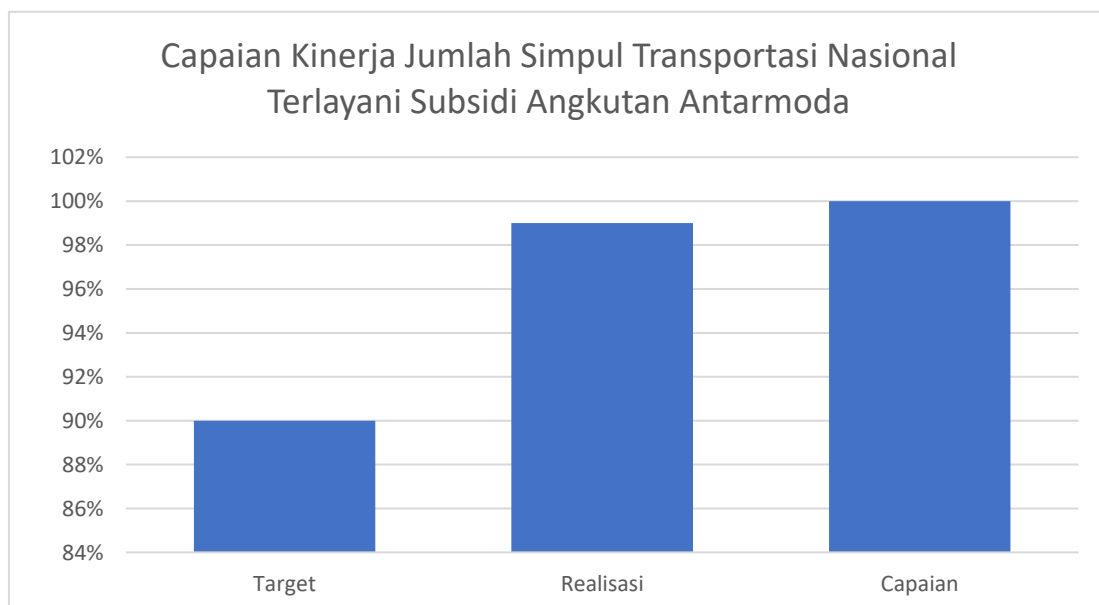
b. IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

b.1 Definisi Indikator Kinerja

Jaringan Lintas Angkutan Barang Perintis dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di jalan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan sesuai dengan KP-DRJD 8824 Tahun 2023. BPTD Kalimantan Utara melayani subsidi Angkutan Barang Tol Laut Provinsi Kalimantan Utara dari pelabuhan Nunukan - Ibu Kota Kabupaten Nunukan dengan Jarak Tempuh Tujuh Kilo Meter.

b.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja terhadap revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda triwulan IV tahun 2025 sebesar 1 jika dibanding target PK tahun 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada gambar II.2 Grafik Capaian IKK jumlah layanan angkutan barang yang beroperasi.



Gambar III. 2 Grafik Capaian IKK Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

b.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 8824 Tahun 2023 Tentang Jaringan lintas angkutan barang perintis dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan untuk barang di jalan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Dimulai dari Pelabuhan Nunukan - Ibu Kota Kabupaten Nunukan Dengan Jarak Tujuh Kilo Meter.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 1 Lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap revisi PK dan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang triwulan IV tahun 2025 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2025.

Dari jumlah trayek dalam Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.550/AJ/501/DRJD/2021 sebanyak 325 diantaranya terdapat 5 (lima) trayek di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut :

No	Provinsi	Trayek yang Dilayani
1	2	3
1	Kalimantan Utara	Tanjung Selor – Tideng Pale
2		Malinau – Selang
3		Tanjung Selor – Long Tunggu
4		Tanjung Selor – Mangkupadi
5		KTT - Malinau

Tabel III. 5 Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda antara lain:



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan barang.
 2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang terluar dan tetinggal.
 3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu bantuan subsidi yang sangat membantu di daerah tersebut.
- Faktor Kegagalan
Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda antara lain:
 1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan;
 2. Ketidak tahuan masyarakat terhadap pelayanan keperintisan angkutan barang.
 - Realisasi Kinerja

Rata-rata Persentase Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Kalimantan Utara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 99% dengan rincian sebagai berikut:

		Trayek					Jumlah
		Tjs - Tideng Pale	Malinau - Salang	Tjs - Long Tunggu	Tjs - Mangkupadi	KTT - Malinau	
Jumlah Trip/ Tahun		24	22	24	24	24	118
Realisasi	Jan	2	0	2	2	2	8
	Feb	2	2	2	2	2	10
	Mar	2	2	2	2	2	10
	Apr	2	2	2	2	2	10
	May	2	2	2	2	2	10
	Jun	2	2	2	2	2	10



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

	Jul	2	2	2	2	2	10
	Aug	2	2	2	2	2	10
	Sep	2	2	2	2	2	10
	Oct	2	2	2	2	2	10
	Nov	2	2	2	2	2	10
	Dec	2	2	2	2	2	10
	Total	24	22	24	24	24	118
Persentase %		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel III. 6 Progres Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Triwulan IV Tahun 2025

Realisasi Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu tercapainya target perjalanan pulang pergi (rit) dan kebermanfaatan dalam satu tahun pelayanan. Capaian rit untuk masing-masing trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

		Trayek					Jumlah
		Tjs - Tideng Pale	Malinau - Salang	Tjs - Long Tunggu	Tjs - Mangkupadi	KTT - Malinau	
Jumlah Rit/ Tahun		319.5	317	592.5	591	596	2416
Realisasi (Trit)	Jan	1	0	1	9	9	20
	Feb	11	11	11	11	10.5	54.5



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Mar	30.5	31	31	31	31	154.5
Apr	30	30	41.5	43.5	38.5	183.5
May	30.5	31	56	60	62	239.5
Jun	30	30	59	59	60	238
Jul	30	31	58	62	60	241
Aug	31	31	64	63	63	252
Sep	30	30	62.5	61	62	245.5
Oct	31	31	64	63	63	252
Nov	30	30	62	61	63	246
Dec	32.5	31	66	63	65	257.5
Total	317.5	317	576	586.5	587	2384
Persentase %	99%	100%	97%	99%	98%	99%

Tabel III. 7 Jumlah Rit Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara
Triwulan IV Tahun 2025

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{2384}{2416} \times 100\% = 99\%$$

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 6.798.180.000 Dengan realisasi di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp.6.797.715.000 Atau mencapai 99,99%.

b.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

1. Meningkatkan keamanan bagi pengguna perintis angkutan barang
2. Meningkatkan kemampuan pelayanan guna mengantisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang
3. Meningkatkan minat masyarakat agar lebih banyak menggunakan perintis angkutan barang

c. IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

c.1 Definisi Indikator Kerja

Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan merupakan kegiatan BPTD Kelas III Kalimantan Utara yang saat ini bertugas untuk melakukan pengawasan operasional harian dan berkala terhadap kapal SDP agar penyelenggaraannya berjalan sesuai aturan dan perjanjian yang telah ditetapkan.

Presentase capaian kinerja pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah trip Penyeberangan yang terealisasi dengan target yang telah ditetapkan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Presentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut :

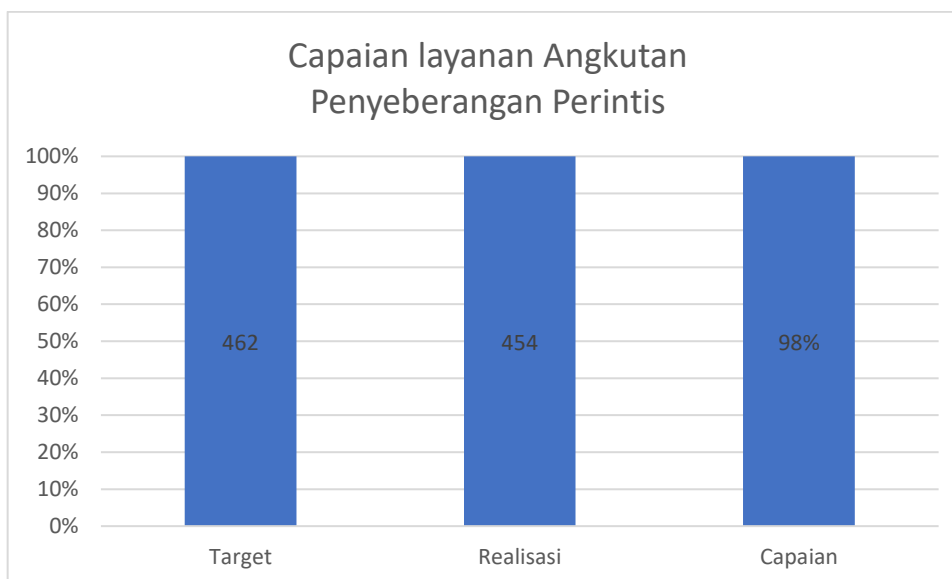
$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

c.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja presentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 sebesar 454 trip jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 98,26%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.3 Grafik Capaian IKK Presentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025



Gambar III. 3 Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

c.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar hukum

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.450/AP.204/DRJD/2019 Tanggal 04 November 2019 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun 2020, terdapat 253 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga) lintas penyeberangan perintis di seluruh Indonesia.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Dari jumlah trayek dalam Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.550/AJ/501/DRJD/2021 sebanyak 325 diantaranya terdapat 3 Lintasan yang melayani angkutan penyeberangan perintis di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

No	Provinsi	Lintasan yang dilayani
(1)	(2)	(3)
1	Kalimantan Utara	Nunukan – Tarakan
2		Nunukan – Seimenggaris
3		Tarakan – Toli Toli

Tabel III. 8 Lintasan Angkutan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025**

Rata-rata presentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Kalimantan Utara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 98,26% dengan rincian sebagai berikut:



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

No	Lintasan	Nama Kapal	Jumlah Trip /Tahun	Realisasi (Trip)												Total Realisasi (Trip)	Presentase (%)
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Nunukan – Tarakan	KMP. Manta II	286	28	18	27	31	27	25	26	25	26	13	12	30	288	100%
2	Nunukan – Seimenggaris	KMP. Manta II	88	8	4	8	12	8	8	8	8	8	4	4	8	88	100%
3	Tarakan – Toli Toli	KMP. Julung-julung	88	7	4	8	12	10	8	4	3	4	8	4	6	78	88,63%
Jumlah			462	43	26	43	55	47	41	38	36	38	25	20	44	454	98,26%



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator presentase pelaksanaan Jumlah Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan antara lain:

1. Terjaminnya operasional angkutan penyeberangan secara rutin dan konsisten sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga mampu menjaga konektivitas antarwilayah terpencil, perbatasan, dan daerah tertinggal.
2. Tersedianya alokasi anggaran subsidi keperintisan yang memadai dan tepat sasaran, sehingga pelayanan tetap berjalan meskipun tingkat kelayakan ekonominya rendah.
3. Penetapan trayek dan jadwal pelayanan yang sesuai dengan pola pergerakan dan kebutuhan masyarakat, sehingga tingkat pemanfaatan layanan meningkat.
4. Adanya penerimaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan angkutan penyeberangan keperintisan sebagai moda transportasi utama.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator presentase pelaksanaan Jumlah Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan antara lain:

1. Keterbatasan dan Ketidaktepatan Alokasi Anggaran
2. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Tidak Memadai
3. Gangguan Operasional dan Cuaca Ekstrem
4. Rendahnya Tingkat Permintaan dan Pemanfaatan Layanan
5. Ketidaksesuaian Trayek dan Jadwal dengan Kebutuhan Masyarakat
6. Minimnya penyampaian informasi terkait jadwal, tarif, dan manfaat layanan keperintisan menyebabkan rendahnya kesadaran dan minat masyarakat

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan keperintisan angkutan penyeberangan yang beroperasi Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{454}{462} \times 100\% = 98\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja presentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2025 sebesar 98,26%. Dimana hasil presentase capaian berasal dari realisasi dibagi target dikali 100 persen. Artinya nilai capaian berhasil memenuhi target.

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait perintis angkutan penyeberangan yang beroperasi Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 15.690.023.000,- dengan realisasi di Tahun 2025 Rp. 13.281.910.757,- atau mencapai 84,65%.

c.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memenuhi persyaratan teknis laik laut dan SPM kapal penyeberangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menghubungkan daerah yang belum memiliki oda transportasi lain secara memadai;
3. Menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani pelayaran niaga;
4. Melaksanakan standar pelayanan sesuai SOP yang telah dibuat.

d. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

d.1 Definisi Indikator Kerja

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara memiliki Pelabuhan Penyeberangan SDP beserta seluruh staff yang berfungsi melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Sungai terhadap keselamatan transportasi angkutan umum di darat berjalan dengan benar serta mengevaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM. Capaian kinerja Jumlah



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

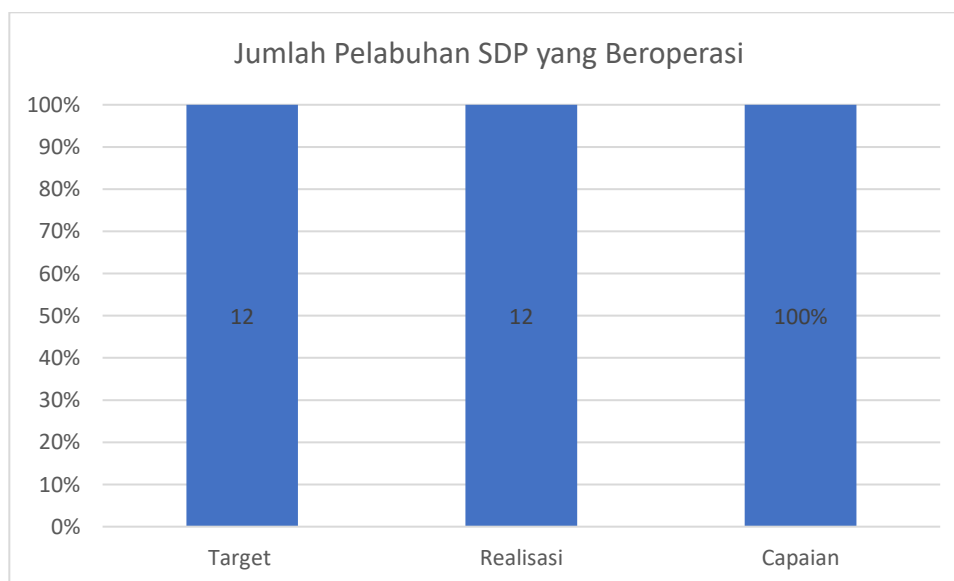
Pelabuhan SDP yang beroperasi dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

d.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja 2025

Capaian Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi triwulan IV tahun 2025 sebesar 12 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 12 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.4 Grafik capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.



Gambar III. 4 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

d.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas III Kalimantan Utara terhadap 6 Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP. Namun sampai dengan bulan Mei tahun 2025, BPTD Kelas III Kalimantan



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

Utara mengawasi 7 Wilayah Kerja dengan 12 Pelabuhan yang beroperasi, sedangkan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2025, BPTD Kelas III Kalimantan Utara mengawasi 7 Wilayah Kerja dengan 7 Pelabuhan yang beroperasi.

No	Provinsi	Pelabuhan yang Beroperasi	Keterangan
1	2	3	4
1	Kalimantan Utara	Pelabuhan Penyeberangan Juwata Laut, Tarakan	Januari – Mei 2025
2		Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun, Nunukan	
3		Pelabuhan Penyeberangan Seimenggaris, Nunukan	
4		Pelabuhan Penyeberangan Liang Bunyu, Nunukan	
5		Pelabuhan Penyeberangan Sebang, KTT	
6		Pelabuhan Sungai Tengkeyu I, Tarakan	Januari – Desember 2025
7		PLBL Liem Hie Djung, Nunukan	
8		Pelabuhan Sungai Nyamuk, Nunukan	
9		Pelabuhan Sungai Tideng Pale, KTT	
10		Pelabuhan Sungai Pulau Bunyu, Bulungan	
11		Pelabuhan Sungai Kayan II, Bulungan	
12		Pelabuhan Sungai Malinau Kota, Malinau	

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas III Kalimantan Utara terdapat 6 Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan, yaitu:
 1. Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun
 2. Pelabuhan Penyeberangan Juata
 3. Pelabuhan Sungai Malinau Kota
 4. Pelabuhan Sungai Djang kida



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

5. Pelabuhan Sungai Sei Ular

Namun pada kenyataannya terdapat 12 Pelabuhan yang beroperasi di Wilayah Kerja BPTD Kelas III Kalimantan Utara, yaitu:

1. Pelabuhan Penyeberangan Juwata Laut, Tarakan
2. Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun, Nunukan
3. Pelabuhan Penyeberangan Seimenggaris, Nunukan
4. Pelabuhan Penyeberangan Liang Bunyu, Nunukan
5. Pelabuhan Penyeberangan Sebawang, KTT
6. Pelabuhan Sungai Tengkeyu I, Tarakan
7. PLBL Liem Hie Djung, Nunukan
8. Pelabuhan Sungai Nyamuk, Nunukan
9. Pelabuhan Sungai Tideng Pale, KTT
10. Pelabuhan Sungai Pulau Bunyu, Bulungan
11. Pelabuhan Sungai Kayan II, Bulungan
12. Pelabuhan Sungai Malinau Kota, Malinau

- Faktor Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator presentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi, antara lain:

1. Petugas yang kompeten di bidangnya
2. Koordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait
3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja
4. Operasional Pelabuhan yang baik
5. Perencanaan yang matang dalam membangun Pelabuhan SDP
6. Anggaran yang terserap dengan baik

- Faktor kegagalan

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator presentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi, antara lain:

1. Kurangnya SDM yang ada
2. Keadaan alam sering menjadi masalah yang sering terjadi di sekitar kantor
3. Masih perlu peningkatan fasilitas kantor
4. Tempat sulit dijangkau



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

- Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

- Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2025 sebesar 100%. Dimana hasil presentase capaian berasal dari realisasi dibagi target 100 persen. Artinya nilai capaian berhasil memenuhi target

$$\% \text{Capaian} = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Operasional Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2025 memiliki target keuangan senilai Rp. 1.258.608.000,- dengan realisasi di Tahun 2025 Rp. 1.041.425.135,- atau mencapai 82,74%.

d.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di Sungai Danau dan Penyeberangan;
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban Pelabuhan SDP;
3. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan melakukan diklat;
4. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan



B. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 Diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Yaitu:

1. IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
2. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
3. IKK 7.a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1 Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas III Kalimantan Utara memiliki tugas dan fungsi untuk menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan, membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan, serta melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang sesuai kondisi ideal. Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda.

Adapun 10 (sepuluh) item dimaksud meliputi:

1. Alat Penerangan Jalan;
2. Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas smart system;
3. Marka Jalan;
4. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
5. Paku Jalan;
6. Rambu Lalu Lintas;
7. Rambu Tiang Gawang;
8. Rambu Tiang F;
9. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan;
10. Pagar Pengaman Jalan;

Capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan. Untuk menghitung Indikator Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

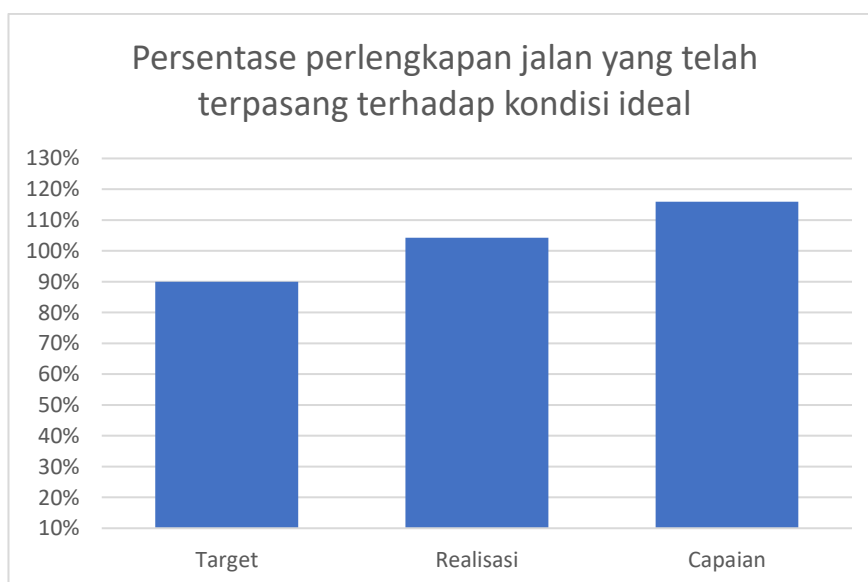


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

$$\text{Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal triwulan IV tahun 2025 sebesar jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 104,30%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.5 Grafik Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal.



Gambar III. 5 Grafik Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal berdasarkan Perjiden SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 90% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2025.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal antara lain:

1. Kondisi dilapangan yang mendukung, seperti cuaca
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu
3. Kesesuaian dengan kebutuhan

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan (Cuaca buruk)
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan
3. Perkiraan Tidak sesuai dengan kebutuhan

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal memiliki realisasi 104,30%. Untuk menghitung Indikator Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian} = \frac{104,30}{90} \times 100\% = 116\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp.25.435.420.000,- dengan realisasi di triwulan IV Tahun 2025



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

Rp.26.529.067.129,- atau mencapai 104,30%.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan jalan yang berkeselamatan.

2. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

b.1 Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas III Kalimantan Utara memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan himbauan Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada para masyarakat melalui kegiatan pekan nasional keselamatan jalan. Capaian kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

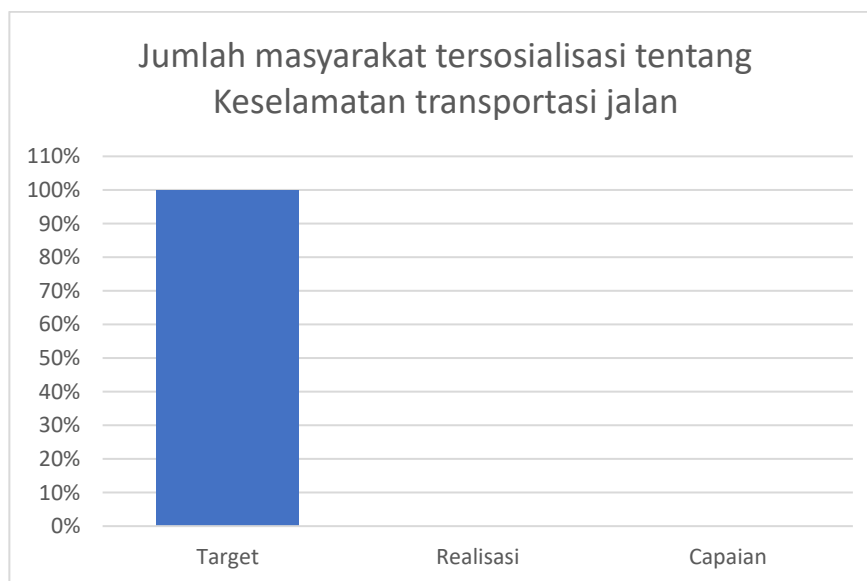
$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja 2025

Capaian kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan triwulan IV Tahun 2025 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 100 orang maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian Ini digambarkan pada Gambar II.6 Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025



Gambar III. 6 Grafik Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

b.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Pasal 208 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tentang Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b "Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Kecepatan terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 100 orang yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Sosialisasi tentang acara Pekan Keselamatan Jalan pada media sosial atau spanduk;



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

2. Tersedianya anggaran yang memadai;
3. Kerjasama Tim panitia pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan.
- Faktor Kegagalan
Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:
 1. Tidak tersampainya informasi keselamatan karena kurangnya informasi tentang sosialisasi;
 2. Kurangnya minat Masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas;
 3. Panitia penyelenggara kurang berpengalaman.
- Realisasi Kinerja
Persentase capaian Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun anggaran 2025 tidak terealisasi karena sosialisasi pekan keselamatan jalan tidak dilaksanakan.
- Capaian Kinerja
Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian} = \frac{0}{100} \times 100\% = 0\%$$

- Realisasi Anggaran
Adapun anggaran terkait Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp.200.000.000,- dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2025 Rp.0,- atau mencapai 0%.

b.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Merencanakan kegiatan sosialisasi keselamatan transportasi jalan dengan matang;



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

2. Memberikan hiburan yang menarik dalam acara sosialisasi keselamatan transportasi jalan;
3. Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait demi terciptanya keberhasilan acara sosialisasi keselamatan transportasi jalan.

c. IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor

c.1 Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas III Kalimantan Utara memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan melakukan pengawasan uji berkala untuk memastikan alat uji disetiap PKB laik fungsi berjalan sesuai SOP pada seluruh kab/kota yang ada di Kalimantan Utara.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan bahwa Unit pelaksana Uji Berkala wajib melaksanakan pengujian setelah memperoleh akreditasi dan sertifikasi, menggunakan peralatan pengujian yang terkalibrasi dan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan hasil uji berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLU-E).

Standarisasi pengujian kendaraan bermotor dalam hal ini sebagai pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota dengan penetapan Akreditasi UPUBKB sebagai bermotor adalah aspek pemenuhan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Capaian kinerja Jumlah Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

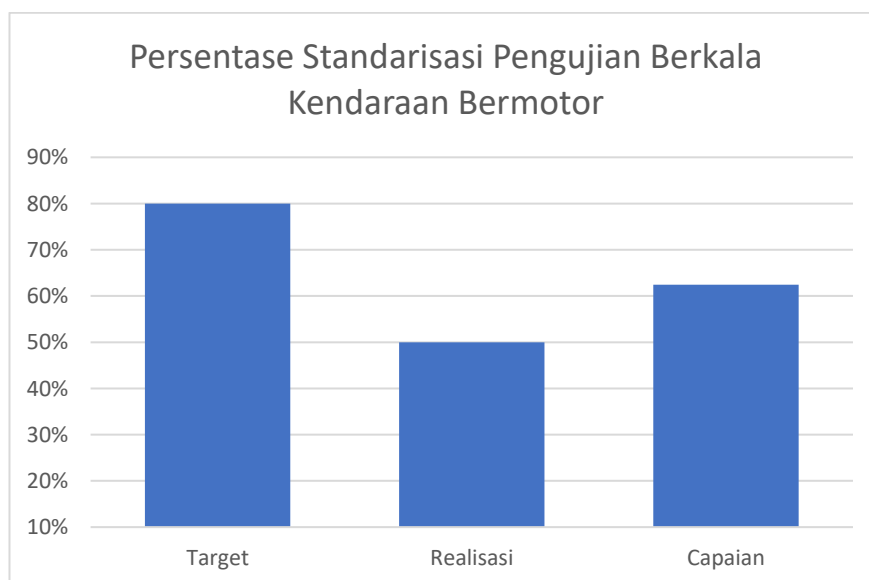
$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

c.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja 2025

Capaian kinerja Persentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor triwulan IV Tahun 2025 sebesar 49,96% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 62,45%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.7 Grafik Capaian IKK Persentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor.



Gambar III. 7 Grafik Persentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor

c.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menjelaskan, Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 80% yang



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor antara lain:

1. Permintaan dari Dishub Kab/ Kota yang ada di Kalimantan Utara;
2. Kelengkapan Alat uji yang akan di kalibrasi;
3. Pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai Standar Operasional Prosedur standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah ditetapkan;
4. Fasilitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang memadai.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor antara lain:

1. SDM yang kurang memadai dan tidak memiliki kompetensi terhadap pengujian kendaraan bermotor;
2. Kurangnya perawatan terhadap peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
3. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang belum memenuhi syarat akreditasi;
4. Ketidakmampuan Dishub Kab/Kota untuk memenuhi Fasilitas dan Alat uji kendaraan bermotor.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor memiliki realisasi 49,96%. Untuk menghitung Indikator Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2025 merupakan kegiatan kalibrasi alat uji pada pengujian kendaraan bermotor di 2 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara yang mana pada Triwulan IV ini belum melakukan kegiatan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor. Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian} = \frac{49,96}{80} \times 100\% = 62,45\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp.2.200.000.000,- dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2025 Rp.1.099.155.300,- atau mencapai 49,96%.

c.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terciptanya deteksi pencapaian kondisi laik pakai untuk menjamin ketelitian, ketepatan alat ukur/uji dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
2. Menjamin peralatan alat ukur/uji yang digunakan harus sesuai spesifikasi yang di persyaratkan;
3. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai standar dan SOP yang telah ditentukan;
4. Terus meningkatkan kualitas SDM terkait pengujian kendaraan bermotor melalui Bimtek dan pelatihan – pelatihan.



**C. Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan
Teknis Transportasi Darat**

IKK 4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dihitung berdasarkan penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan di lakukan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu Integrasi Perencanaan (40%), Sikronisasi Perencanaan dan Penganggaran (40%) dan Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah (20%). Untuk menghitung Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Proses perumusan meliputi:

1. Aspek Penilaian;
2. Pembobotan Nilai;
3. Parameter;
4. Jumlah responden (*sampling metode*).

Keterangan:

Aspek Penilaian:

- a. Indeks SPBE Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara;
- b. Indeks Kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara;
- c. Indeks Profesionalisme ASN Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara;
- d. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara;
- e. Nilai SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara;
- f. Indeks Pengawasan Kearsipan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara;



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

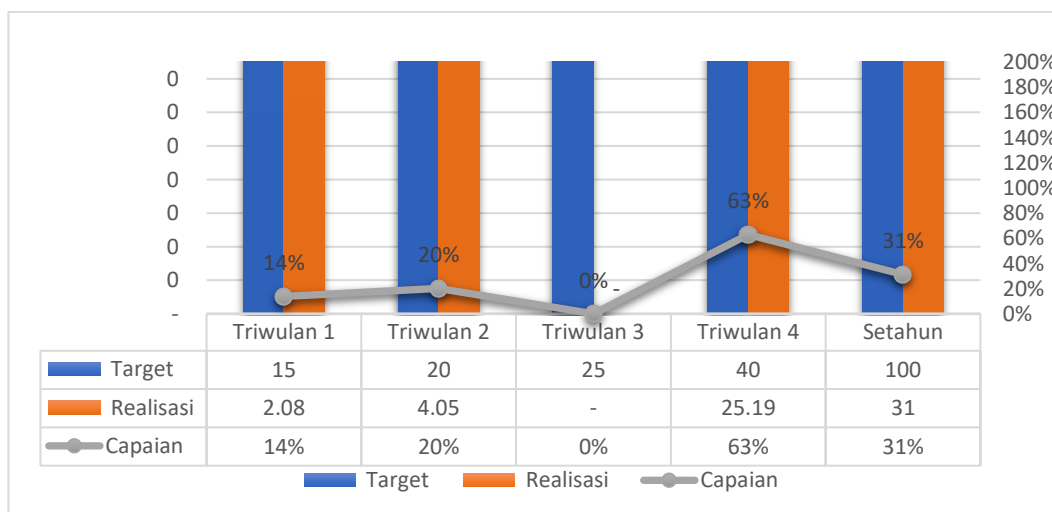
KELAS III KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

- g. Indeks Maturitas SPIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara;
 - h. Indeks Perencanaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara;
 - i. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Indeks Pengelolaan Keuangan Ditjen Perhubungan Darat;
 - j. Indeks Pengelolaan Aset Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara;
 - k. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara;
 - l. Indeks Kepemimpinan Perubahan Ditjen Perhubungan Darat;
 - m. Reputasi Positif Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara;
 - n. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara, dokumentasi kegiatan pada Lampiran 5 laporan ini.
- a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025
- Capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2025 sebesar 31% berdasarkan target PK 2025 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 31%. Pencapaian ini digambarkan sebagai berikut :



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025



Gambar III. 8 Capaian Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025.

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Dari hasil pencapaian pada Tahun 2025 ini dimana Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, adalah bernilai 31% dimana pencapaian ini telah mencapai target atau persentasenya sebesar 31%.

- Dasar Hukum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat.

- Kronologi Target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terhadap Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis transportasi darat memiliki target 85 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun 2025 dengan berdasarkan arahan pimpinan pada rapat renstra 2025-2029. Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2025.

- Capaian Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat di Tahun 2025 terhadap



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{31}{100} \times 100\% = 31\%$$

Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat pada tahun 2025 telah dilakukan untuk kegiatan penunjang teknis. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Penyusunan bahan RKA
 2. Penyusunan SAKIP, LKIP dan Profil BPTD
 3. Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat;
 4. Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;
 5. Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
 6. Kalibrasi alat uji;
 7. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun;
 8. Sosialisasi Andalalin di Provinsi Kalimantan Utara;
 9. Pengawasan Gakum;
 10. Pengiriman Pegawai Diklat
 11. Penyidikan dan pendampingan pasal 277 UU Tahun 2009
 12. Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan Bidang LLAJ
- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang sudah ditentukan
2. Terkoordinasikannya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dengan stakeholder terkait
3. SDM yang bersolidaritas

- Faktor Potensi Kegagalan

Adapun Faktor potensi Kegagalan terhadap indikator Kualitas penyelenggaraan



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Adanya pengurangan anggaran
2. kurangnya SDM yang ada
- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025 Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan Penunjang Teknis Transportasi Darat senilai Rp. 1.820.462.976

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
2. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat;
3. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat;
4. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

D. Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

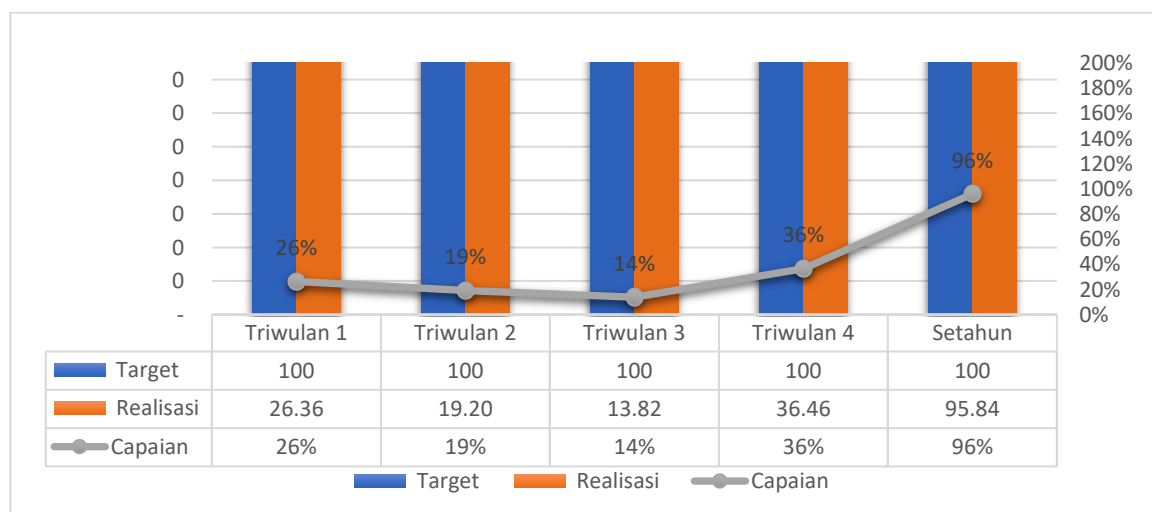
a. IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1 Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan keberhasilan pelaksanaan administrasi perkantoran pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara, seperti : administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi teknis lainnya.

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2025

Capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2025 sebesar 0 berdasarkan target PK 20 sebesar 100, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar III. 9 Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum untuk kegiatan untuk kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

1. PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lampiran 17);
2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lampiran 18).

- **Kronologi Target**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terhadap Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel memiliki target 100 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun 2025 dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara pada tahun 2025 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya Manajemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Lingkungan BPTD Kelas III Kalimantan Utara. Adapun beberapa pelayanan perkantoran yang telah diserap, yaitu :

1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2. Honorarium Satuan Kerja
3. Honorarium ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP
4. Gaji dan Tunjangan Pegawai

- **Capaian Kinerja**

Berdasarkan pencapaian Tahun 2025, Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara tercapai sebesar 96%. Dimana target dalam tahun 2025 secara keseluruhan adalah mencapai nilai 100.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Adanya SDM yang berkompeten
2. Kegiatan yang ada di Kantor sudah terjadwal secara rutin



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

3. Evaluasi setiap bulan
 - Faktor Potensi Kegagalan
Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:
 1. Masih kurangnya SDM yang berkompeten;
 2. Pengurangan Anggaran;
 3. Belum berjalannya *Reward* untuk pegawai yang telah berkontribusi secara baik di Kantor BPTD Kelas III Kalimantan Utara dan *Punishment* untuk pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai.
 - Anggaran
Adapun anggaran terkait Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 Operasional dan Pemeliharaan Kantor senilai Rp. 13.539.434.777.
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang
- Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
1. Peningkatan motivasi kepada seluruh pegawai oleh Kepala Balai terkait pentingnya, peningkatan akuntabilitas baik di bidang Kepegawaian, Keuangan dan aspek teknis lainnya;
 2. Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dalam menjalankan tugasnya.

III.3 REALISASI ANGGARAN

III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

A. Pagu Anggaran

Pagu Awal DIPA TA. 2025 sebesar **Rp 81.065.404.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

RM	Rp. 78.780.404.000,-	97,18%
PNBP	Rp. 2.285.000.000-	2,82%
SBSN	Rp. -	0%
Total	Rp. 81.065.404.000,-	100%



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Gambar III. 10 Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025

III.3.2. Refocussing Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor : SP DIPA-022.03.690663/2025 tanggal 2 Desember 2024 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara sebesar Rp. 80.647.405.000,- dari nilai awal sebesar Rp. 81.065.404.000.-.

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE-1	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE-2	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE-3	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE-4	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE-5	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE-6	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE-7	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE-8	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE-9	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE-10	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE-11	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE-12	78.361.363.000	2.285.000.000	-	80.646.363.000
REVISI KE-13	78.361.363.000	2.285.000.000	-	80.646.363.000
REVISI KE-14	78.623.021.000	2.385.000.000	-	81.008.021.000
REVISI KE-15	78.623.021.000	2.385.000.000	-	81.008.021.000
REVISI KE-16	78.623.021.000	2.385.000.000	-	81.008.021.000
REVISI KE-17	78.623.021.000	2.385.000.000	-	81.008.021.000
REVISI KE-18	78.295.181.000	2.385.000.000	-	80.680.181.000



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

REVISI KE-19	78.295.181.000	2.385.000.000	-	80.680.181.000
REVISI KE-20	78.262.405.000	2.385.000.000	-	80.647.405.000
REVISI KE-21	78.262.405.000	2.385.000.000	-	80.647.405.000
REVISI KE-22	78.262.405.000	2.385.000.000	-	80.647.405.000

Tabel III. 9 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2025

Sumber: Tim Pengelola Keuangan, BPTD Kelas III Kalimantan Utara

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE-1	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE-2	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE-3	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE-4	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE-5	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE-6	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE-7	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE-8	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE-9	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE-10	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
REVISI KE-11	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE-12	7.071.009.000	54.733.027.000	18.842.327.000	80.646.363.000
REVISI KE-13	7.071.009.000	54.733.027.000	18.842.327.000	80.646.363.000
REVISI KE-14	7.071.009.000	51.500.542.000	22.436.470.000	81.008.021.000
REVISI KE-15	7.071.009.000	51.500.542.000	22.436.470.000	81.008.021.000
REVISI KE-16	7.071.009.000	51.500.542.000	22.436.470.000	81.008.021.000
REVISI KE-17	7.071.009.000	50.873.390.000	23.063.622.000	81.008.021.000
REVISI KE-18	7.071.009.000	50.545.550.000	23.063.622.000	80.680.181.000
REVISI KE-19	7.071.009.000	50.545.550.000	23.063.622.000	80.680.181.000
REVISI KE-20	7.038.233.000	50.545.550.000	23.063.622.000	80.647.405.000
REVISI KE-21	7.038.233.000	50.545.550.000	23.063.622.000	80.647.405.000
REVISI KE-22	7.038.233.000	50.545.550.000	23.063.622.000	80.647.405.000

Tabel III. 10 Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2025

Sumber: Tim Pengelola Keuangan, BPTD Kelas III Kalimantan Utara



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025**

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR	PERUBAHAN	PAGU AKHIR	PERUBAHAN	PAGU AKHIR	PERUBAHAN	PAGU AKHIR
			PER TRIWULAN I		PER TRIWULAN II		PER TRIWULAN III		PER TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	6.645.590.000	6.645.590.000	6.645.590.000	6.645.590.000	6.645.590.000	7.071.009.000	7.071.009.000	7.038.233.000	7.038.233.000
Belanja Barang	55.577.487.000	55.577.487.000	55.577.487.000	55.577.487.000	55.577.487.000	50.873.390.000	50.873.390.000	50.545.550.000	50.545.550.000
· RM	54.392.487.000	54.392.487.000	54.392.487.000	54.392.487.000	54.392.487.000	49.588.390.000	49.588.390.000	49.260.550.000	49.260.550.000
· PNBP	1.185.000.000	1.185.000.000	1.185.000.000	1.185.000.000	1.185.000.000	1.285.000.000	1.285.000.000	1.285.000.000	1.285.000.000
Belanja Modal	18.842.327.000	18.842.327.000	18.842.327.000	18.842.327.000	18.842.327.000	23.063.622.000	23.063.622.000	23.063.622.000	23.063.622.000
· RM	17.742.327.000	17.742.327.000	17.742.327.000	17.742.327.000	17.742.327.000	21.963.622.000	21.963.622.000	21.963.622.000	21.963.622.000
· PNBP	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
· SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	81.065.404.000	81.065.404.000	81.065.404.000	81.065.404.000	81.065.404.000	81.008.021.000	81.008.021.000	80.647.405.000	80.647.405.000

Tabel III. 11 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2025

Sumber: Tim Pengelola Keuangan, BPTD Kelas III Kalimantan Utara

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi) :



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS III KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	81.065.404.000	81.065.404.000	13.301.533.085	16,41	81.065.404.000	15.563.580.070	19,20	81.008.021.000	10.222.554.978	12,62	80.647.405.000	29.539.476.543	36,63
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	68.211.375.000	68.211.375.000	9.912.766.127	14,53	68.211.375.000	13.007.278.297	19,07	65.828.890.000	8.124.068.274	12,34	65.501.050.000	24.043.597.201	36,71
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	34.789.195.000	34.789.195.000	737.830.826	2,12	34.789.195.000	6.123.831.704	17,60	30.506.710.000	5.306.521.922	17,39	28.906.710.000	12.429.414.907	43,00
4638	Pelayanan Transportasi Darat	1.985.760.000	1.985.760.000	658.707.600	33,17	1.985.760.000	109.945.500	5,54	1.258.608.000	54.925.409	4,36	1.258.608.000	217.846.626	17,31
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	27.335.420.000	27.335.420.000	8.430.849.600	30,84	27.335.420.000	6.607.420.006	24,17	28.435.420.000	2.762.620.943	9,72	29.707.580.000	9.827.331.880	33,08
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.101.000.000	4.101.000.000	85.378.101	2,08	4.101.000.000	166.081.087	4,05	5.628.152.000	0	0,00	5.628.152.000	1.569.003.788	27,88
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	12.854.029.000	12.854.029.000	3.388.766.958	26,36	12.854.029.000	2.556.301.773	19,89	15.179.131.000	2.098.486.704	13,82	15.146.355.000	5.495.879.342	36,29
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.208.439.000	6.208.439.000	1.588.594.387	25,59	6.208.439.000	851.041.131	13,71	8.108.122.000	547.109.700	6,75	8.108.122.000	3.754.897.695	46,31
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	6.645.590.000	6.645.590.000	1.800.172.571	27,09	6.645.590.000	1.705.260.642	25,66	7.071.009.000	1.551.377.004	21,94	7.038.233.000	1.740.981.647	24,74



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

[illegible]

Tabel III. 12 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2025

Sumber: Tim Pengelola Keuangan, BPTD Kelas III Kalimantan Utara



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

III.3.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Berikut merupakan data perbandingan pagu dan realisasi anggaran BPTD Kelas
III Kalimantan Utara untuk tahun 2024 dan 2025 :

NO	Jenis Rupiah	2024		2025	
		Pagu Akhir	Realisasi	Pagu Akhir	Realisasi
1.	Belanja Pegawai	Rp -	Rp -	Rp 6.645.590.000,00	Rp 1.705.260.642,00
2.	Belanja Barang	Rp 50.521.016.000,00	Rp 48.145.403.792,00	Rp 55.577.487.000,00	Rp 1.049.869.657,00
3.	Belanja Modal	Rp 11.758.990.000,00	Rp 947.098.186,00	Rp 18.842.327.000,00	Rp 15.482.704.144,00
TOTAL		Rp 62.280.006.000,00	Rp 49.092.501.978,00	Rp 81.065.404.000,00	Rp 18.237.834.443,00

III.3.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan
per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2025, untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	6.645.590.000	1.705.260.642	4.940.329.358
2	Belanja Barang	55.577.487.000	10.498.696.572	45.078.790.428
3	Belanja Modal	18.842.327.000	3.359.622.856	15.482.704.144
TOTAL		81.065.404.000	15.563.580.070	65.501.823.930

Tabel III. 13 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI
		Rp.	Rp.
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana	0	0
2	Kegiatan yang Terblokir	10.924.423.000	0
3	Sisa Kontraktual	54.584.420.000	53.760.951.788
	a. Belanja Barang	35.048.663.000	34.236.183.472
	b. Belanja Modal	19.535.757.000	19.524.768.316
4	Sisa Non Kontraktual	8.100.329.000	8.068.401.024
	a. Belanja Barang	5.971.683.000	5.940.759.125
	b. Belanja Modal	2.128.646.000	2.127.641.899
5	Sisa Belanja Pegawai	7.038.233.000	6.797.791.864
TOTAL			68.627.144.676

Tabel III. 14 Rincian sisa Anggaran Tahun 2025

Dari total pagu anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dan sebesar Rp 80.647.405.000,- (Delapan puluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp. 12.020.260.324 (Dua belas miliar dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana;
2. Ada Kegiatan yang terblokir dengan dana 10.924.423.000 (Sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah.);
3. Kegiatan Kontraktual semuanya telah terlaksana sesuai jadwal;
4. Sisa Belanja Barang dan Modal Rp. 855.396.188,- (Delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025

III.3.5 Hambatan dan Kendala

Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 mengalami kendala dikarenakan masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BPTD Kelas III Kalimantan Utara.

BAB 4



PENUTUP



ditjen_hubdat



hubdat151



Ditjen Perhubungan Darat



hubdat.dephub.go.id

IV.1 Penutup

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dituntut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan darat secara proporsional, berkesinambungan, dan selaras dengan Rencana Strategis periode 2025–2029. Dalam penetapan Sasaran Kinerja dan Indikator Kegiatan, perlu senantiasa mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kondisi aktual di Provinsi Kalimantan Utara.

IV.2 Ringkasan Capaian

Wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya organisasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, yakni merupakan pelaksanaan tahun pertama, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2025 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan hasil 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$) dari 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase layanan angkutan jalan perintis terealisasi sebesar 99,99% dari Target PK 90%;
 - b. Persentase Jumlah Simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda sebesar 100% (Target 1 Lokasi);
 - c. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 84,65% (Target 90%);

- d. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 100% (Target 11 lokasi);
 - e. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 104% (Target 90%);
 - f. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0% (Target 100 orang);
 - g. Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar 49,96% (Target 80%);
 - h. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 29,23% (Target 100);
 - i. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 89,2% (Target 100).
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara secara berkelanjutan meningkatkan dan memperkuat koordinasi serta sinergi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan darat. Upaya koordinasi tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan transparan, serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien guna memberikan pelayanan publik yang prima;
3. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara akan melakukan penyempurnaan dalam proses pengusulan target Rencana Strategis melalui mekanisme yang lebih selektif dan terukur. Penetapan target tersebut dilaksanakan dengan menerapkan skala prioritas yang berfokus pada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat. Proses perencanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat ketersediaan dan kemampuan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sehingga target yang ditetapkan bersifat realistis, efektif, dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	90	90	99,99 %	111%	TERCAPAI	Memastikan pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan Jalan nasional berjalan sesuai dengan target serta memberikan pelayanan yang nyaman dan aman.	Bidang Sarana dan Angkutan Jalan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
			IKK 1.2	Jumlah transportasi simpul nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	1	1	100%	TERCAPAI	Memastikan tersubsidinya jaringan simpul transportasi nasional yang ada.	Bidang Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
			IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	90	84,65%	94,05%	TERCAPAI	Memastikan pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan berjalan sesuai dengan target dan memberikan pelayanan yang nyaman dan aman.	Bidang Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	11	11	100%	TERCAPAI	Perlu dilakukan monitoring secara berkala untuk meningkatkan dan menjaga fasilitas di Pelabuhan agar dapat menciptakan pelayanan yang nyaman dan aman.	Bidang Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
2	SK 4	Meningkatnya Keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	90	104	115%	TERCAPAI	Memastikan Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terus dilakukan peningkatan guna menuju kondisi ideal yang diharapkan.	Bidang Sarana dan Angkutan Jalan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
			IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Lokasi	100	0	0	0%	TIDAK TERCAPAI	Dikarenakan adanya kondisi pemblokiran anggaran pada sub kegiatan Sosialisasi keselamatan Transportasi, sehingga pelaksanaan sosialisasi keselamatan belum bisa dilakukan.	Bidang Sarana dan Angkutan Jalan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
			IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	50	49,96	99,92%	TERCAPAI	Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor secara berkala untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan.	Bidang Sarana dan Angkutan Jalan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
3	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100	100	29,23	29,23%	TIDAK TERCAPAI	1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; 2. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat;	Bidang Tata Usaha

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
											3. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat; 4. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.	
4	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	100	89,2	89,20%	TIDAK TERCAPAI	Di tahun 2025 Penyelenggaraan perkantoran pada tahun tersebut belum mencapai target 100%, sehingga perlunya dilakukan peningkatan disiplin administrasi pada masing – masing unit kerja	1. BidangTata Usaha 2. Bidang Sarana dan Angkutan JSDP 3. Seksi Prasarana LLAJSDP



LAMPIRAN



ditjen_hubdat



hubdat151



Ditjen Perhubungan Darat



hubdat.dephub.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1 Renaksi Tahun 2025

RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11
2	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
4	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Tanjung Selor, 29 November 2024
Kepala Balai,



IRDA HARIYONO SOEKIRNO, S.SiT.,M.M.
NIP 197101241995031001



PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Kalimantan Utara Tahun 2025

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Kalimantan Utara
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Desti Amelia, A.Md. LLASDP	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	2 / 01 2025	
2.	Dikonsep	Parida Febrianti, A.Md. LLASDP	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	2 / 01 2025	
3.	Dikonsep	Dhia Nazriati, A.Md. LLASDP	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	2 / 01 2025	
4.	Diperiksa	Irda Hariyono Soekirno, S.SiT., M.M.	Kepala Balai	2 / 01 2025	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irda Hariyono Soekirno, S.SiT.,M.M

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D.,M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D.,M.T.
NIP 196509301990031003

Tanjung Selor, 2 Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara

IRDA HARIYONO SOEKIRNO, S.SiT.,M.M
NIP 1971012495031001

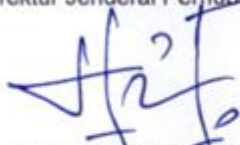
Lampiran I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11
2	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
4	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 34.789.195.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 1.985.760.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 27.335.420.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.101.000.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.208.439.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 6.645.590.000

Disetujui
Pit. Direktur Jenderal Perhubungan Darat



AHMAD YANI, A.T.D.,M.T.
NIP 196509301990031003

Tanjung Selor, 2 Januari 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara



IRDA HARIYONO SOEKIRNO, S.SiT.,M.M
NIP 1971012495031001



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Kalimantan Utara Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Kalimantan Utara
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Desti Amelia, A.Md. LLASDP	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	1/7 2025	DA
2.	Dikonsep	Valka Ramdani Himawan S.Tr.T	Penelaah Teknis Kebijakan	1/7 2025	Vri
3.	Dikonsep	Dhia Nazriati, A.Md. LLASDP	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	01/07 2025	DZ
4.	Diperiksa	Iwan Sarwoko, S.SiT.,M.T.	Kepala Balai	01/7 2025	IS



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Sarwoko, S.SiT.,M.T

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan M,Si

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat


2 Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 196701312025211001

Tanjung Selor, Juli 2025
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara


IWAN SARWOKO, S.SiT.,M.T
NIP. 197604101998031006



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Sarwoko, S.SiT.,M.T

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan M,Si

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat


Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 196701312825211001

Tanjung Selor, Juli 2025
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara


IWAN SARWOKO, S.SiT., M.T
NIP. 197604101998031006

Lampiran I

**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11
2	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
4	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 34.789.195.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 1.985.760.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 27.335.420.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.101.000.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.208.439.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 6.645.590.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 196701312025211001

Tanjung Selor, Juli 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara



IWAN SARWOKO, S.SiT., M.T.
NIP. 197604101998031006

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 34.789.195.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 1.985.760.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 27.335.420.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.101.000.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.208.439.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 6.645.590.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 196701312025211001

Tanjung Selor, Juli 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara



IWAN SARWOKO, S.Si, M.T.
NIP. 197604101998031006



REVISI II PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Kalimantan Utara Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi II Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Kalimantan Utara
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	VALKA RAMDANI HIMAWAN, S.Tr.T	Penelaah Teknis Kebijakan	13/11/2025	
2.	Dikonsep	Puguh Adityawan, A.Md. Tra	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	13/11/2025	
3.	Dikonsep	Nafictor Arohmat, A.Md.LLASDP	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	13/11/2025	
4.	Diperiksa	IWAN SARWOKO, S.SiT., M.T	Kepala Balai	13/11/2025	



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Sarwoko, S.SiT., M.T

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Selor, November 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat


H Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si. 
NIP 196701312025211001

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara


IWAN SARWOKO, S.SiT., M.T
NIP 19604101998031006

Lampiran I

**REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11
2	SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80
3	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
4	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 28.906.710.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 1.258.608.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 29.707.580.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 5.628.152.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 8.108.122.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 7.038.233.000

Tanjung Selor, November 2025

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat


H. Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si. a,
NIP 196701312025211001

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara


IWAN SARWOKO, S.SiT., M.T
NIP 19604101998031006

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN JANUARI

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		% Capaian Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	%	%	%			
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan	%	90	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	5	90%	0	100%	0	0	90%	0%	BELUM TERLAKSANA	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 5 trayek yang beroperasi di tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan	Kepala Balai
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.3 Persentase Layanan Angkutan Barang Prioritas Nasional (Subsidi Angkutan Barang)	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Barang	1	90%	0	100%	0	0	90%	0%	BELUM TERLAKSANA	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan barang bagi masyarakat guna meningkatkan Distribusi barang dan meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Trayek Kegiatan perintis angkutan barang 2025 masih sama dengan tahun 2024 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis angkutan barang berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan	Kepala Balai
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keberintisan angkutan penyeberangan	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keberintisan angkutan penyeberangan	Layanan Angkutan Perintis Penyeberangan	2	90%	0	100%	0	0	90%	0%	BELUM TERLAKSANA	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan perintis Penyeberangan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 2 trayek yang beroperasi di tahun 2025 sama dengan tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis ASDP berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan	Kepala Balai
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan SDP	IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	11	100%	148.932.000	100%	11	302.559.000	100%	203%	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SDP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan. 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan.	Kepala Balai
2	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	9	90%	6.528.000.000	100%	6	6.461.919.600	67%	99%	TERCAPAI	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang 4. Terdapat Kegiatan Perlengkapan Jalan yang sudah dilakukan kontrak dan pencairan Uang Muka 5. Penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan	Kepala Balai
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang sosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	IKK3.5 Jumlah masyarakat yang sosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Pelayanan keselamatan Transportasi Jalan	1	100	0	100%	0	0	100%	0%	BELUM TERLAKSANA	Akan dilaksanakan Pekan Keselamatan Jalan pada bulan Juni - Juli	Kepala Balai
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	80%	0	100%	0	0	80%	0%	BELUM TERLAKSANA	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala akan dilakukan setelah adanya arahan lebih lanjut mengenai efisiensi dan penghematan anggaran	Kepala Balai
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	6	100%	225.895.833	100%	6	29.328.520	100%	13%	TERCAPAI	1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 6. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas, dan Angkutan 7. Kegiatan Sudah Dilaksanakan akan tetapi realisasi anggaran keluar SP2D dibulan Februari 8. Adanya Inpres mengenai Efisiensi dan Penghematan anggaran sehingga dapat mengurangi penyerapan anggaran yang akan dilakukan	Kepala Balai
4	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	1	100%	1.057.536.583	100%	1	1.361.337.573	100%	129%	TERCAPAI	Kegiatan yang terdapat dalam sub ini yaitu kegiatan operasional perkantoran. Kegiatan sudah tercapai.	Kepala Balai

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN FEBRUARI

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		% Capaian Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	%	%	%			
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	543 Meningkatkan keefektifitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	5	90%	0	100%	0	0	45%	0%	SUDAH DIKANSASAKAN	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 5 trayek yang beroperasi di tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Akan tetapi pada bulan Februari sudah memulai operasional akan tetapi tidak melayani full atau hanya dilayani setengah bulan. Realisasi Anggaran terhambat karena adanya addendum kontrak akibat efisiensi anggaran	Kepala Balai
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.3 Persentase Layanan Angkutan Barang Prioritas Nasional (Subsidi Angkutan Barang)	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Barang	1	90%	0	100%	0	0	45%	0%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Layanan Angkutan Perintis Penyeberangan	2	90%	0	100%	0	0	45%	0%			
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDF yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan SDF	IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDF yang beroperasi	Pengawasan operasional Pelabuhan SDF	11	100%	105.480.000	100%	11	304.603.500	100%	184%			
2	544 Meningkatkan keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	9	90%	1.941.282.000	100%	6	157.500.000	67%	8%	TORCAPAI	1. Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan 2. Membangun dan memelihara infrastruktur keselamatan jalan 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang 4. Terdapat Kegiatan Perlengkapan jalan yang sudah dilakukan kontrak dan pencairan Uang Muka 5. Penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan Pengadaan Perlengkapan jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan Akan dilaksanakan Pakaian Keselamatan Jalan pada bulan Juni - Juli dan terdapat Efisiensi Anggaran sehingga anggaran nya terkena Blokir	Kepala Balai
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang sosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Penyelenggaraan Pakaian Keselamatan Jalan	IKK3.5 Jumlah masyarakat yang sosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Pelayanan keselamatan Transportasi Jalan	1	100	0	100%	0	0	100%	0%			
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	80%	0	100%	0	0	80%	0%			
3	545 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tugas Dijen Hubdat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tugas Dijen Hubdat	6	100%	225.885.833	100%	6	54.699.581	100%	24%	TORCAPAI	1. Pengkajian Bidang Ketersediaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 6. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas, dan Angkutan 7. Kegiatan Sudah Dilaksanakan akan tetapi realisasi anggaran keluar SP2D dibulan Februari 8. Adanya Inspeksi mengenai Efisiensi dan Penghematan anggaran sehingga dapat mengurangi penyerapan anggaran yang akan dilakukan. 9. Terdapat anggaran yang terkena blokir akibat efisiensi anggaran 10. Realisasi terhambat dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.	Kepala Balai
4	543 Meningkatkan Birokrasi Dijen Perhubungan Darat Akutabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	1	100%	1.071.160.083	100%	1	868.105.907	100%	81%	TORCAPAI	Kegiatan yang terdapat dalam sub ini yaitu kegiatan operasional perkantoran. Kegiatan sudah tercapai. Akan tetapi realisasi terhambat dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran	Kepala Balai

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN MARET

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		% Capaian Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output Volume	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	5	90%	296.877.132	100%	5	196.710.179	100%	66%	SUDAH DIKESANAKAN	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 5 trayek yang beroperasi di tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Akan tetapi pada bulan Maret sudah beroperasi normal. Capaian anggaran kurang dikarenakan terdapat tagihan yang tidak sesuai dengan nilai termin atau addendum nilai pada termin dan terdapat realisasi anggaran yang seharusnya dibulan maret akan tetapi SP2Dnya dibulan berikutnya.	Kepala Balai
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani subsidi Angkutan Antar moda	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Barang	1	90%	1.051.000.000	100%	0	541.120.647	100%	51%	SUDAH DIKESANAKAN	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan barang bagi masyarakat guna meningkatkan Distribusi barang dan meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Trayek Kegiatan perintis angkutan barang 2025 masih sama dengan tahun 2024 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis angkutan barang berhenti dan pada bulan maret sudah beroperasi seperti biasa. Capaian anggaran kurang dikarenakan terdapat tagihan yang tidak sesuai dengan nilai termin atau addendum nilai pada termin tersebut	Kepala Balai
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Layanan Angkutan Perintis Penyeberangan	2	90%	1.071.240.000	100%	2	0	100%	0%	BELUM OPTIMAL	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan perintis penyeberangan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 2 trayek yang beroperasi di tahun 2025 sama dengan tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran akan tetapi pada bulan Maret sudah mulai operasional seperti biasa. kegiatan ini sudah berjalan tetapi untuk penyerapan anggaran belum terlaksana dikarenakan tagihan dan laporan kegiatan dari penyedia belum ada masuk ke kantor	Kepala Balai
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan SDP	IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	11	100%	17.331.750	100%	11	51.545.100	100%	297%	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SDP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan 4. Penyerapan Anggaran pada kegiatan ini sudah mencapai 84,4% disebabkan adanya blokir terkait efisiensi anggaran	Kepala Balai
2	SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK1.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	IKK1.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	9	90%	1.808.591.400	100%	6	1.611.430.000	67%	100%	TERCAPAI	1. Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan 2. Merencanakan dan mendanai infrastruktur keselamatan jalan 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang 4. Adanya Addendum kontrak yang merubah nilai kontrak dan hanya dibayarkan uang muka saja dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran	Kepala Balai
		IKK1.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	IKK1.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Pelayanan keselamatan Transportasi Jalan	1	100	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM TERLAKSANA	Akan dilaksanakan Pekan Keselamatan Jalan pada bulan Juni - Juli dan terdapat Efisiensi Anggaran sehingga anggaran nya terkena Blokir	Kepala Balai
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	80%	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM TERLAKSANA	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala akan dilakukan setelah adanya arahan lebih lanjut mengenai efisiensi dan penghematan anggaran	Kepala Balai
3	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	6	100%	21.403.690	100%	6	1.350.000	100%	6%	TERCAPAI	1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 6. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas, dan Angkutan 7. Kegiatan Sudah Dilaksanakan akan tetapi realisasi anggaran keluar SP2D dibulan Februari 8. Adanya Ispres mengenai Efisiensi dan Penghematan anggaran sehingga dapat mengurangi penyerapan anggaran yang akan dilakukan. 9. Terdapat anggaran yang terkena blokir akibat efisiensi anggaran 10. Realisasi terhambat dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.	Kepala Balai
4	SK5 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	1	100%	928.105.752	100%	1	1.159.263.478	100%	125%	TERCAPAI	Kegiatan yang terdapat dalam sub ini yaitu kegiatan operasional perkantoran. Kegiatan sudah selesai.	Kepala Balai

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN APRIL

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		% Capaian Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output		Capaian Output				
								Vol	%	Vol	%	Volume	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	5	90%	425.791.436	100%	5	427.253.906	100%	100%	SUDAH DILAKSANAKAN	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 5 trayek yang beroperasi di tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Akan tetapi pada bulan Maret sudah beroperasi normal.	Kepala Balai
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.3 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani subsidi Angkutan Antarmoda	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Barang	1	90%	531.515.000	100%	0	531.515.000	100%	100%	SUDAH DILAKSANAKAN	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan barang bagi masyarakat guna meningkatkan Distribusi barang dan meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Trayek Kegiatan perintis angkutan barang 2025 masih sama dengan tahun 2024 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis angkutan barang berhenti dan pada bulan Maret sudah beroperasi seperti biasa.	Kepala Balai
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Layanan Angkutan Perintis Penyeberangan	2	90%	1.037.907.000	100%	2	1.388.661.166	100%	134%	SUDAH DILAKSANAKAN	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan perintis Penyeberangan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 2 trayek yang beroperasi di tahun 2025 sama dengan tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran akan tetapi pada bulan Maret sudah mulai operasional seperti biasa.	Kepala Balai
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan SDP	IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	11	100%	13.530.267	100%	11	0	100%	0%	BELUM OPTIMAL	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan 4. Penyerapan Anggaran pada kegiatan ini sudah mencapai 84,4% disebabkan adanya blokir terkait efisiensi anggaran 5. Anggaran yang tersedia hanya untuk belanja modal baru dikontrakan dibulan Mei.	Kepala Balai
2	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	9	90%	2.260.029.600	100%	6	3.260.990.700	67%	144%	TERCAPAI	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang 4. Adanya Addendum kontrak yang merubah nilai kontrak dan hanya dibayarkan uang muka saja dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran	Kepala Balai
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Pelayanan keselamatan Transportasi Jalan	1	100	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM TERLAKSANA	Akan dilaksanakan Pekan Keselamatan Jalan pada bulan Juni - Juli dan terdapat Efisiensi Anggaran sehingga anggaran nya terkena Blokir	Kepala Balai
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	80%	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM TERLAKSANA	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala akan dilakukan setelah adanya arahan lebih lanjut mengenai efisiensi dan penghematan anggaran	Kepala Balai
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	6	100%	23.631.878	100%	6	75.000.000	100%	317%	TERCAPAI	1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 6. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas, dan Angkutan 7. Kegiatan Sudah Dilaksanakan akan tetapi realisasi anggaran keluar SP2D dibulan Februari 8. Adanya lpmn mengenai Efisiensi dan Penghematan anggaran sehingga dapat mengurangi penyerapan anggaran yang akan dilakukan. 9. Terdapat anggaran yang terkena blokir akibat efisiensi anggaran.	Kepala Balai
4	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	1	100%	902.421.560	100%	1	719.857.685	100%	80%	TERCAPAI	Kegiatan yang terdapat dalam sub ini yaitu kegiatan operasional perkantoran. Kegiatan ini tercapai karena operasional kantor berjalan dengan lancar hanya realisasi anggaran yang kurang dikarenakan anggaran operasional banyak yang terkena blokir dan yang tidak terkena blokir di gaji PPNPN yang terdapat kelebihan dan rencananya akan dipindahkan ke Gaji PJK.	Kepala Balai

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN MEI

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		% Capaian Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab				
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran							
								Vol	%	Vol	%								Volume	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	S83 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan ketersediaan antarmoda transportasi	RK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalimantan Utara	RK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	5	90%	496.945.190	100%	5	0	100%	0%	SUDAH DIKAKSANAKAN	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 5 trayek yang beroperasi di tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dibukanya pendanaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Akan tetapi pada bulan Maret sudah beroperasi normal. Kegiatan ini pada bulan Mei beroperasi dengan normal akan tetapi untuk laporan tagihan diakhir Mei sehingga SP2D keluar di bulan Juni sehingga berpengaruh pada realisasi anggaran untuk kegiatan ini di bulan Mei	Kepala Balai				
		RK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara	RK1.3 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani subsidi Angkutan Antarmoda	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Barang	1	90%	611.891.608	100%	0	611.891.608	100%	100%				Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan barang bagi masyarakat guna meningkatkan Distribusi barang dan meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Trayek kegiatan perintis angkutan barang 2025 masih sama dengan tahun 2024 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dibukanya pendanaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis angkutan barang berhenti dan pada bulan Maret sudah beroperasi seperti biasa.	Kepala Balai		
		RK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Utara	RK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Layanan Angkutan Perintis Penyeberangan	2	90%	1.134.812.148	100%	2	1.030.484.271	100%	98%						Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan perintis penyeberangan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 2 trayek yang beroperasi di tahun 2025 sama dengan tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dibukanya pendanaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran akan tetapi pada bulan Maret sudah mulai operasional seperti biasa. Realisasi kurang dari target penyerapan anggaran dikarenakan adanya addendum dan pendapatan dari kapal bertambah sehingga berkurangnya nilai tagihan atau realisasi menjadi kurang dari target penyerapan.	Kepala Balai
		RK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan SDP	RK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	11	100%	15.221.550	100%	11	0	100%	0%							
2	S84 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	RK2.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpajang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	RK2.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpajang terhadap kondisi ideal	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	9	90%	1.826.375.900	100%	6	2.860.588.081	67%	148%	TERCAIR	1. Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan 2. Membangun dan memelihara infrastruktur keselamatan jalan 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpajang	Kepala Balai				
		RK2.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	190	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	RK2.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Pelayanan keselamatan Transportasi Jalan	1	100	0	100%	0	0	0%	0%				Akan dilakukan akan Pekan Keselamatan Jalan pada bulan Juli - Juli dan terdapat Efisiensi Anggaran sehingga anggaran nya terkendala Blokir	Kepala Balai		
		RK2a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	RK2a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	80%	0	100%	0	0	0%	0%						Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala akan dilakukan setelah adanya arahan lebih lanjut mengenai efisiensi dan penghematan anggaran	Kepala Balai
3	S85 Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	RK3.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tapak Dijen Hubdat	RK3.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tapak Dijen Hubdat	6	100%	17.210.862	100%	6	83.041.087	100%	488%	TERCAIR	1. Pengelolaan Ruang Kota/daerah 2. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Laku Lintas 5. Monitoring Pengendalian Laku Lintas 6. Pengawasan Sarana, Prasarana, Laku Lintas, dan Angkutan 7. Kegiatan Sudah Dilaksanakan akan tetapi realisasi anggaran keluar SP2D di bulan Februari 8. Adanya target efisiensi dan penghematan anggaran sehingga dapat mengurangi penyerapan anggaran yang akan dilakukan. 9. Terdapat anggaran yang terkendala blokir akibat efisiensi anggaran.	Kepala Balai				
		4	S82 Meningkatkan Efisiensi Dijen Perhubungan Darat Akuntabel	RK3 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	RK3 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	1	100%	925.242.045	100%	1	675.787.043				100%	79%		

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN JUNI

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		% Capaian Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	S61 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpadatan antarmoda transportasi	R01.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalimantan Utara	R01.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	5	90%	456.916.798	100%	5	770.441.417	100%	100%	SUDAH DIKASUSAKAN	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 5 trayek yang beroperasi di tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Akan tetapi pada bulan Maret sudah beroperasi normal. Realisasi melebihi target dikarenakan termin yang harusnya dibayarkan di bulan mei akan tetapi muncul SP20 dibulan Juni	Kepala Balai
		R01.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara	R01.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani subsidi Angkutan Antarmoda	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Barang	1	90%	611.891.608	100%	0	611.891.608	100%	100%	SUDAH DIKASUSAKAN	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan barang bagi masyarakat guna meningkatkan Distribusi barang dan meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Trayek kegiatan perintis angkutan barang 2025 masih sama dengan tahun 2024 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis angkutan barang berhenti dan pada bulan Maret sudah beroperasi seperti biasa.	Kepala Balai
		R01.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Utara	R01.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Layanan Angkutan Perintis Penyeberangan	2	90%	1.047.128.000	100%	2	737.682.726	100%	70%	SUDAH DIKASUSAKAN	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan perintis penyeberangan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 2 trayek yang beroperasi di tahun 2025 sama dengan tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran akan tetapi pada bulan Maret sudah mulai operasional seperti biasa. Realisasi kurang dari target penyempitan anggaran dikarenakan adanya addendum dan penjadwalan dari kapal bertambah sehingga berkurangnya nilai tagihan atau realisasi menjadi kurang dari target penyempitan.	Kepala Balai
		R01.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan SDP	R01.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	11	100%	17.396.857	100%	11	189.946.508	100%	62%	TERCAKAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SDP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan. 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Penyerapan Anggaran pada kegiatan ini sudah mencapai 96,48% disebabkan adanya blokir terkait efisiensi anggaran.	Kepala Balai
2	S64 Meningkatnya keselamatan Transportasi Darat	R02.1 Persentase perlangkapan jalan yang telah terpacing terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlangkapan Jalan Prioritas Nasional	R02.1 Persentase perlangkapan jalan yang telah terpacing terhadap kondisi ideal	Perlangkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	9	90%	872.970.873	100%	6	486.241.225	67%	50%	TERCAKAI	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan 2. Membangun dan memanfaatkan infrastruktur keselamatan jalan 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpacing 4. Terdapat 5 anggaran 5. Penyerapan Anggaran pada kegiatan ini sudah mencapai 86,08% disebabkan adanya blokir terkait efisiensi anggaran	Kepala Balai
		R02.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Penyenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	R02.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Pelatihan keselamatan Transportasi Jalan	1	100	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM TERLAKSANA	Akan dilaksanakan Pekan Keselamatan Jalan terdapat Efisiensi Anggaran sehingga anggaran nya terbelas Blokir	Kepala Balai
		R02a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	R02a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	80%	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM TERLAKSANA	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala akan dilakukan setelah adanya arahan lebih lanjut mengenai efisiensi dan penghematan anggaran	Kepala Balai
3	S65 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	R03.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tapak Dijen Hubdat	R03.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tapak Dijen Hubdat	4	100%	7.477.972	100%	4	7.540.000	100%	99%	TERCAKAI	1. Pengelolaan Ruang Kantor 2. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 6. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas, dan Angkutan 7. Adanya upaya mengawal Efisiensi dan Penghematan anggaran sehingga dapat mengawal penyerapan anggaran yang akan dilakukan 8. Terdapat anggaran yang terkendala blokir akibat efisiensi anggaran.	Kepala Balai
4	S63 Meningkatnya Kinerja Dijen Perhubungan Darat Akuntabel	R01 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	R01 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	1	100%	960.876.473	100%	1	1.349.857.081	100%	121%	TERCAKAI	Kegiatan yang terdapat dalam sub ini yaitu kegiatan operasional perkantoran. Kegiatan ini tercapai karena operasional kantor berjalan dengan lancar, anggaran operasional banyak yang terkendala blokir dan yang tidak terkendala blokir di gap RP/RN yang terdapat kelebihan dan rencananya akan dipindahkan ke Gaji PAK.	Kepala Balai

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN JULI

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		% Capaian Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	S63 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan ketersediaan antarmoda transportasi	BK3.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalimantan Utara	BK3.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	5	90%	436.945.190	100%	5	401.434.488	100%	99%	TERCAPI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 5 trayek yang beroperasi di tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilaksanakannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Akan tetapi pada bulan Juli terdapat penurunan realisasi anggaran dikarenakan terdapat penurunan tagihan dari penyedia sehingga mengurangi nilai target realisasi, akan tetapi operasional masih berjalan dengan normal	Kepala Balai
		BK3.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara	BK3.3 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani subsidi Angkutan Antarmoda	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Barang	1	90%	611.891.608	100%	0	626.926.608	100%	100%	TERCAPI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan barang bagi masyarakat guna meningkatkan Distribusi barang dan meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Trayek Kegiatan perintis angkutan barang 2025 masih sama dengan tahun 2024 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilaksanakannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis angkutan barang berhenti dan pada bulan Maret sudah beroperasi seperti biasa.	Kepala Balai
		BK3.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Utara	BK3.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Layanan Angkutan Perintis Penyeberangan	2	90%	1.549.063.618	100%	2	1.133.425.473	100%	72%	TERCAPI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan perintis penyeberangan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 2 trayek yang beroperasi di tahun 2025 sama dengan tahun 2024 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilaksanakannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran akan tetapi pada bulan Maret sudah mulai operasional seperti biasa. Realisasi kurang dari target penyerapan anggaran dikarenakan tagihan ini merupakan tagihan termis sebelumnya dimana tagihannya lebih rendah dibanding dengan target tagihan dibulan Juli ini. untuk tagihan dibulan Juli sudah diajukan akan tetapi SP2D dibulan Agustus.	Kepala Balai
		BK3.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan SDP	BK3.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	11	100%	129.546.000	100%	11	9.942.250	100%	8%	BELUM OPTIMAL	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SDP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan. 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan 4. Realisasi anggaran sangat kurang dikarenakan adanya realisasi anggaran dari Dijen Hubdat pada bulan Juli sehingga belum optimal dalam melakukan penyerapan anggaran pada kegiatan operasional wilayah kerja pada RPTD Kelas III Kalimantan Utara.	Kepala Balai
2	S64 Meningkatnya keselamatan Transportasi Darat	BK3.2 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	BK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	9	90%	27.118.500	100%	8	822.825.314	89%	1002%	TERCAPI	1. Menginventarisir kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan 2. Membangun dan memperbaiki infrastruktur keselamatan jalan 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang 4. Terdapat 50 anggaran 5. Penyerapan Anggaran lebih tinggi dikarenakan adanya realisasi anggaran dari Dijen Hubdat pada bulan Juli sehingga terdapat pembayaran uang muka pada kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang sebelumnya belum direncanakan untuk dilakukan. pembayaran karena sebelumnya anggaran terkonsentrasi blakir	Kepala Balai
		BK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	BK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Pelayanan keselamatan Transportasi Jalan	1	100	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM TERLAKSANA	Akan dilaksanakan Pekan Keselamatan Jalan terdapat Disfensi Anggaran sehingga anggaran nya terkonsentrasi blakir	Kepala Balai
		BK3a Persentase Standardisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	BK3a Persentase Standardisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	80%	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM TERLAKSANA	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala akan dilakukan setelah adanya arahan lebih lanjut mengenai efisiensi dan penghematan anggaran	Kepala Balai
3	S65 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	BK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tapak Dijen Hubdat	BK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tapak Dijen Hubdat	6	100%	7.767.635	100%	6	0	100%	0%	TERCAPI	1. Pengelolaan Bidang Kemotokarutan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 6. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas, dan Angkutan 7. Adanya laporan mengenai Disfensi dan Penghematan anggaran sehingga dapat mengurangi penyerapan anggaran yang akan dilakukan. 8. Realisasi sudah 84,34% anggaran yang tersedia hanya pada kegiatan. Nota dan tahun baru. kegiatan tersebut akan dilakukan pada akhir tahun 2025 sehingga berpengaruh pada realisasi dan target realisasi	Kepala Balai
4	S65 Meningkatnya Efisiensi Dijen Perhubungan Darat Akuntabel	BK3 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	BK3 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	1	100%	620.701.898	100%	1	652.287.018	100%	505%	TERCAPI	Kegiatan yang terdapat dalam sub ini yaitu kegiatan operasional perkantoran. Kegiatan ini tercapai karena operasional kantor berjalan dengan lancar, anggaran operasional banyak yang terkonsentrasi blakir dan yang tidak terkonsentrasi blakir digaji PMPN yang terdapat kelebihan dan rencananya akan dipindahkan ke Gaji PAB.	Kepala Balai

DILAN AGUSTUS

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Engkapan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun B				Revisi Tahun B		% Capaian Tahun B		Evaluasi	Bencana Tidak Jangkit	Penanggung Jawab						
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output Volume	Realisasi Anggaran %	Capaian Output %	Capaian Anggaran %									
								Sol	%	Sol	%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	001 Meningkatkan keselamatan transportasi darat dan ketepatan waktu moda transportasi	K01.2 Persentase pelaksanaan kegiatan angkutan jalan	%	90	Subsidi Operasional Bus Provinsi Kalimantan Utara	K01.2 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	9	80%	618.100.000	100%	9	604.905.043	100%	100%	TERCAJAI	Mengurangi atau meniadakan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang sulit, ini berarti langkah untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Target Kegiatan perintis angkutan bus provinsi tahun 2023 pada bulan Januari sudah dilakukan kembali akan tetapi pada akhir Januari terdapat kendala Presiden untuk dilakukannya pemadatan atau penghematan sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional angkutan perintis jalan berhentilah sementara sampai maret yang tidak bisa direalisasikan. Akan tetapi pada bulan Juli terdapat pemadatan realisasi anggaran akan maka terdapat pemadatan lagi dari provinsi sehingga mengakibatkan nilai target realisasi, akan tetapi operasional masih berjalan dengan normal.	Bupati Balai						
		K01.2 Jumlah trip angkutan nasional layanan subsidi angkutan antar kota	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara	K01.2 Jumlah Trip Transportasi Nasional Terintegrasi Subsidi Angkutan Antar Kota	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Barang	1	80%	611.891.000	100%	0	611.891.000	100%	100%				TERCAJAI	Mengurangi atau meniadakan subsidi untuk angkutan barang bagi masyarakat guna meningkatkan produksi barang dan meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Target Kegiatan perintis angkutan barang 2023 maret sama dengan tahun 2024 pada bulan Januari sudah dilakukan kembali akan tetapi pada akhir Januari terdapat kendala Presiden untuk dilakukannya pemadatan atau penghematan sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional angkutan perintis angkutan barang berhenti dan pada bulan maret sudah beroperasi seperti biasa.	Bupati Balai			
		K01.3 Persentase pelaksanaan pelayanan transportasi anggotanya	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyelenggaraan Perantara Kalimantan Utara	K01.3 Persentase pelaksanaan pelayanan transportasi anggotanya	Layanan Angkutan Perintis Penyelenggaraan	2	80%	1.569.000.000	100%	2	626.120.685	100%	100%							TERCAJAI	Mengurangi atau meniadakan subsidi untuk angkutan perintis. Penyelenggaraan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Target 2 Triwulan yang beroperasi di tahun 2023 sama dengan tahun 2024 pada bulan Januari sudah dilakukan kembali akan tetapi pada akhir Januari terdapat kendala Presiden untuk dilakukannya pemadatan atau penghematan sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran akan tetapi pada bulan Maret sudah mulai operasional seperti biasa. Realisasikan dari target penyelenggaraan anggotanya akan ada secara otomatis dan pendataan dari kapal lain kembali sehingga kelengkapan nilai target akan realisasi menjadi kurang dari target penyelenggaraan.	Bupati Balai
		K01.4 Jumlah pendapatan GDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan GDP	K01.4 Jumlah pendapatan GDP yang beroperasi	Pengawasan operasional Pelabuhan GDP	11	100%	120.500.000	100%	11	60.968.150	100%	100%									
2	002 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	K01.2 Persentase peningkatan jalan yang telah beroperasi terhadap kondisi ideal	%	90	Peningkatan dan Pemeliharaan Peningkatan Jalan Perintis Nasional	K01.2 Persentase peningkatan jalan yang telah beroperasi terhadap kondisi ideal	Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan	9	80%	500.900.000	100%	9	606.584.974	89%	124%	TERCAJAI	1. Mengurangi atau meniadakan subsidi untuk perbaikan jalan. 2. Melakukan dan memonitoring indikator keselamatan jalan. 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah beroperasi. 4. Penyelenggaraan jalan lebih tinggi dikarenakan adanya realisasi anggaran dari Dipen Halohal pada bulan Juli sehingga terdapat permasalahan Ujung Muka pada kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang sebelumnya belum selesai akan tetapi dilakukan pemeriksaan karena keterlambatan anggaran hingga bulan Desember.	Bupati Balai						
		K01.3 Jumlah masyarakat yang tersalurkan bidang keselamatan transportasi jalan	Diklat	100	Peningkatan dan Pemeliharaan Peningkatan Jalan Perintis Nasional	K01.3 Jumlah masyarakat yang tersalurkan bidang keselamatan transportasi jalan	Peningkatan keselamatan transportasi jalan	1	100	0	100%	0	0	0%	0%				BILAI SIFAT KUALITAS	Akan dilaksanakan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan terdapat Efisiensi Anggaran sehingga anggaran nya berbeda bulan.	Bupati Balai			
		K01.4 Persentase standar kualitas pelayanan transportasi	%	80	Peningkatan dan Pemeliharaan Peningkatan Jalan Perintis Nasional	K01.4 Persentase standar kualitas pelayanan transportasi	Mati Kalkulasi QP Berkala Keselamatan Berjalan	1	80%	0	100%	0	0	0%	0%							BILAI SIFAT KUALITAS	Pengadaan alat Kalkulasi QP Berkala akan dilakukan setelah adanya arahan lebih lanjut mengenai efisiensi dan pengembangan.	Bupati Balai
3	003 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknik Transportasi Darat	K01.3 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknik Transportasi Darat	Milial	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tugaski Di Depen Halohal	K01.3 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknik Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tugaski Di Depen Halohal	6	100%	6.899.894	100%	6	0	100%	0%	TERCAJAI	1. Pengawasan Bidang Keselamatan 2. Monitoring Pengawasan Keamanan dan Angkutan 3. Monitoring Pengawasan dan Pengembangan Perawatan 4. Monitoring Pengawasan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengawasan Lalu Lintas 6. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas, dan Angkutan 7. Adanya biaya operasi Efisiensi dan Pengembangan anggaran sehingga dapat mengoptimalkan penyelenggaraan yang akan dilakukan. 8. Realisasi sudah 84,18% anggaran yang tersedia hingga pada kegiatan Mutasi dan lain-lain. Kegiatan tersebut akan dilakukan pada akhir tahun 2023 sehingga diharapkan pada mutasi dan target realisasi.	Bupati Balai						
4	004 Meningkatkan Berlangsung Dipen Pelaksanaan Darat-Bandar	K01.1 Tingkat Penyelenggaraan Pelaksanaan Dipen Pelaksanaan Darat	Milial	100	Peningkatan dan Pemeliharaan Pelaksanaan Dipen Pelaksanaan Darat	K01.1 Tingkat Penyelenggaraan Pelaksanaan Dipen Pelaksanaan Darat	Layanan Dukungan	1	100%	710.900.000	100%	1	710.200.000	100%	100%	TERCAJAI	Anggaran yang terdapat dalam sub ini yaitu kegiatan operasional bandara. Kegiatan ini meliputi semua operasional bandar bandara.	Bupati Balai						

MONITORING KENCAMA ANSI ATAS PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN SEPTEMBER

NO	Isiuran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		% Capaian Bulan 9		Realisasi	Rencana Terakumulasi	Peningkatkan
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%			
1	001. Meningkatkan Investasi, Pemeliharaan, dan Pengembangan Infrastruktur Transportasi	001.1. Pemeliharaan perbaikan jalan nasional angkutan jalan	%	90	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalimantan Utara	001.1. Pemeliharaan Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	9	90%	928.958.786	100%	9	921.729.161	100%	77%	27	18	
	001. Meningkatkan Investasi, Pemeliharaan, dan Pengembangan Infrastruktur Transportasi	001.2. Jumlah tempat transportasi nasional melayani angkutan antar moda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Rangsang Perintis Kalimantan Utara	001.1. Jumlah Tempat Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar moda	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Rangsang	1	90%	611.891.609	100%	1	604.891.609	100%	100%			Benyala Balat
		001.3. Pemeliharaan perbaikan pelayanan transportasi angkutan penyeberangan	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan Perintis Kalimantan Utara	001.3. Pemeliharaan perbaikan pelayanan transportasi angkutan penyeberangan	Layanan Angkutan Perintis Penyeberangan	2	90%	488.638.643	100%	2	483.687.261	100%	100%			Benyala Balat
		001.6. Jumlah perbaikan LDP yang beroperasi	Lokasi	10	Operasional Perbaikan LDP	001.6. Jumlah Perbaikan LDP yang beroperasi	Pengawasan operasional Perbaikan LDP	10	100%	0	100%	11	0	100%	0%			Benyala Balat
		1. Melakukan pengarsipan dokumen dan berdiskusi lebih mendalam perbaikan LDP terkait biaya dan tanggung jawab seluruh staf perbaikan penyeberangan	2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM	3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait biaya dan tanggung jawab serta koordinasi untuk pelaksanaan operasional di Perbaikan penyeberangan	4. Realisasi anggaran sangat kurang dikarenakan adanya realisasi anggaran dari DIPA Sekolah pada bulan Juli sehingga belum optimal dalam melakukan persiapan anggaran pada kegiatan operasional wilayah kerja pada BPTS Babel, II Kalimantan Utara	5. Selama pengarsipan dan berdiskusi dan koordinasi staf berdiskusi dengan staf berdiskusi dengan staf sehingga mengoptimalkan operasional tahun kerja pada BPTS Babel, II Kalimantan Utara												
2	003. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi Darat	003.1. Pemeliharaan pengembangan jalan yang telah beroperasi termasuk kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Pengembangan Jalan Prioritas Nasional	003.1. Pemeliharaan pengembangan jalan yang telah beroperasi termasuk kondisi ideal	Pengembangan Fasilitas Komunikasi Jalan	9	90%		100%	8	1.131.826.638	89%	90%/91			Benyala Balat
		003.5. Jumlah masyarakat yang terlayani layanan komunikasi transportasi jalan	Orang	300	Pengembangan Fasilitas Komunikasi Jalan	003.5. Jumlah masyarakat yang terlayani layanan komunikasi transportasi jalan	Pelayanan Komunikasi Transportasi Jalan	1	300	0	100%	0	0	0%	0%			Benyala Balat
		003.6. Pemeliharaan Standar Pelayanan Berhala Kendaraan Bermotor	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berhala Kendaraan Bermotor	003.6. Pemeliharaan Standar Pelayanan Berhala Kendaraan Bermotor	Alat Kalibrasi Uji Berhala Kendaraan Bermotor	1	80%	0	100%	0	0	0%	0%			Benyala Balat
3	003. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dukung Tolok Transportasi Darat	003.1. Kualitas Pelayanan Dukung Tolok Transportasi Darat	Nilai	300	Pemeliharaan dan Evaluasi serta Pelayanan Tolok Tolok Tolok	003.1. Kualitas Pelayanan Dukung Tolok Transportasi Darat	Pemeliharaan dan Evaluasi serta Pelayanan Tolok Tolok Tolok	16	100%	0	0%	8	0	0%	0%			Benyala Balat
		1. Melakukan pengarsipan dokumen dan berdiskusi lebih mendalam perbaikan LDP terkait biaya dan tanggung jawab seluruh staf perbaikan penyeberangan	2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM	3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait biaya dan tanggung jawab serta koordinasi untuk pelaksanaan operasional di Perbaikan penyeberangan	4. Realisasi anggaran sangat kurang dikarenakan adanya realisasi anggaran dari DIPA Sekolah pada bulan Juli sehingga belum optimal dalam melakukan persiapan anggaran pada kegiatan operasional wilayah kerja pada BPTS Babel, II Kalimantan Utara	5. Selama pengarsipan dan berdiskusi dan koordinasi staf berdiskusi dengan staf berdiskusi dengan staf sehingga mengoptimalkan operasional tahun kerja pada BPTS Babel, II Kalimantan Utara												
		1. Melakukan pengarsipan dokumen dan berdiskusi lebih mendalam perbaikan LDP terkait biaya dan tanggung jawab seluruh staf perbaikan penyeberangan	2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM	3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait biaya dan tanggung jawab serta koordinasi untuk pelaksanaan operasional di Perbaikan penyeberangan	4. Realisasi anggaran sangat kurang dikarenakan adanya realisasi anggaran dari DIPA Sekolah pada bulan Juli sehingga belum optimal dalam melakukan persiapan anggaran pada kegiatan operasional wilayah kerja pada BPTS Babel, II Kalimantan Utara	5. Selama pengarsipan dan berdiskusi dan koordinasi staf berdiskusi dengan staf berdiskusi dengan staf sehingga mengoptimalkan operasional tahun kerja pada BPTS Babel, II Kalimantan Utara												

d	001. Meningkatkan Efisiensi Biaya dan Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan	001. Tingkat Peningkatan Perbaikan dan Pemeliharaan	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perbaikan	001. Tingkat Peningkatan Perbaikan dan Pemeliharaan	Layanan dan Biaya	1	100%	720.000.000	100%	1	720.000.000	100%	100%	TERCAPAI	Regulasi yang berlaku dalam hal ini yaitu regulasi operasional perusahaan. Regulasi ini tercapai karena operasional kantor berjalan dengan lancar.	Regulasi
---	---	--	-------	-----	----------------------------------	--	-------------------	---	------	-------------	------	---	-------------	------	------	----------	--	----------

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN OKTOBER

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		% Capaian Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	5K1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	5	90%	406.945.190	100%	5	602.798.702	100%	148%	TERCAJAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 5 trayek yang beroperasi di tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Instruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis jalan berhenti sementara. Kemudian untuk realisasi anggaran lebih dari pada target anggaran nya dikarenakan ada pencatatan anggaran termin yang sudah diajukan dibulan September tetapi untuk SP2D nya keluar pada Bulan Oktober	Kepala Balai
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.3 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani subsidi Angkutan Antarmoda	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Barang	1	90%	611.891.609	100%	1	666.101.609	100%	109%	TERCAJAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan barang bagi masyarakat guna meningkatkan Distribusi barang dan meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Trayek kegiatan perintis angkutan barang 2025 masih sama dengan tahun 2024 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Instruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis angkutan barang berhenti dan pada bulan Maret sudah beroperasi seperti biasa.	Kepala Balai
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Layanan Angkutan Perintis Penyeberangan	2	90%	588.764.008	100%	2	746.202.347	100%	127%	TERCAJAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan perintis penyeberangan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 2 trayek yang beroperasi di tahun 2025 sama dengan tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Instruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran akan tetapi pada bulan Maret sudah mulai operasional seperti biasa.	Kepala Balai
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan SDP	IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	11	100%	58.540.999	100%	11	79.227.413	100%	0%	TERCAJAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SDP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan 4. Realisasi anggaran sangat kurang dikarenakan adanya realisasi anggaran dari Ditjen Hubdat pada bulan Juli sehingga belum optimal dalam melakukan penyerapan anggaran pada kegiatan operasional wilayah kerja pada BPTD Kelas III Kalimantan Utara. 5. Adanya penyerahan taji keselamatan dan keamanan dari perhubungan darat ke perhubungan laut sehingga mengurangi jumlah operasional satuan kerja pada BPTD Kelas III Kalimantan Utara	Kepala Balai
2	5K4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	9	90%	4.163.258.149	100%	8	3.953.467.745	89%	95%	TERCAJAI	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang 5. Penyempurnaan Anggaran lebih tinggi dikarenakan adanya realisasi anggaran dari Ditjen Hubdat pada bulan Juli sehingga terdapat pembayaran Uang Muka pada kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang sebelumnya belum direncanakan untuk dilakukan pembayaran karena sebelumnya anggaran terkensu blokir	Kepala Balai
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang ter sosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	IKK3.5 Jumlah masyarakat yang ter sosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Pelayanan keselamatan Transportasi Jalan	1	100	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM TERLAKSANA	Akan dilaksanakan Pekan Keselamatan Jalan terdapat Efisiensi Anggaran sehingga kegiatan tidak akan dilaksanakan.	Kepala Balai
		IKK7a Persentase Standartisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	IKK7a Persentase Standartisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	80%	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM TERLAKSANA	Pemeliharaan dan Pengadaan Alat Kalibrasi akan dilaksanakan, untuk anggaran sudah ada pada bulan September sehingga pada bulan tersebut sudah mulai melaksanakan kontrak dan akan dibayar setelah barang yang diudat sampai dengan kondisi sesuai dengan spesifikasi yang kita ajukan.	Kepala Balai
3	5K5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK6.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tipologi Ditjen Hubdat	IKK6.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tipologi Ditjen Hubdat	6	100%	49.771.711	0%	6	544.855.368	100%	1000%	TERCAJAI	1. Pengelolaan Bidang Kertasubstansi 2. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 6. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas, dan Angkutan 7. Adanya Inpres mengenai Efisiensi dan Penghematan anggaran sehingga dapat mengurangi penyerapan anggaran yang akan dilakukan. 8. Realisasi sudah 84,36% anggaran yang tersedia hanya pada kegiatan Natal dan tahun baru. kegiatan tersebut akan dilakukan pada akhir tahun 2025 sehingga berpengaruh pada realisasi dan target realisasi 9. Adanya Realisasi Anggaran pada bulan september sehingga terdapat penambahan anggaran pada kegiatan ini.	Kepala Balai
4	5K1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	1	100%	679.663.885	100%	1	716.757.297	100%	105%	TERCAJAI	Kegiatan yang terdapat dalam sub ini yaitu kegiatan operasional perkantoran. Kegiatan ini tercapai karena operasional kantor berjalan dengan lancar.	Kepala Balai

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN NOVEMBER

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		% Capaian Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	5	90%	429.313.706	100%	5	429.313.706	100%	100%	TERCAPI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 5 trayek yang beroperasi di tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis jalan berhenti sementara. Kegiatan operasional sampai bulan ini sudah berjalan dengan normal.	Kepala Balai
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.3 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani subsidi Angkutan Antarmoda	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Barang	1	90%	611.891.609	100%	1	655.781.609	100%	107%	TERCAPI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan barang bagi masyarakat guna meningkatkan Distribusi barang dan meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Trayek Kegiatan perintis angkutan barang 2025 masih sama dengan tahun 2024 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis angkutan barang berhenti dan pada bulan Maret sudah beroperasi seperti biasa.	Kepala Balai
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Layanan Angkutan Perintis Penyeberangan	2	90%	3.369.639.818	100%	2	768.298.706	100%	23%	TERCAPI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan perintis penyeberangan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 2 trayek yang beroperasi di tahun 2025 sama dengan tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran akan tetapi pada bulan Maret sudah mulai operasional seperti biasa. Realisasi Anggaran memiliki deviasi yang tinggi dengan target penyerapan dikarenakan adanya addendum kontrak yang disebabkan oleh Load factor yang menyebabkan pendapatan dari kapal meningkat sehingga mengurangi nilai dalam termin yang akan diajukan. Kegiatan masih berjalan dengan normal dan beroperasi sesuai dengan target.	Kepala Balai
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan SDP	IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	11	100%	49.667.996	100%	11	110.651.213	100%	0%	TERCAPI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan 4. Realisasi anggaran sangat kurang dikarenakan adanya relaxasi anggaran dari Ditjen Hubdat pada bulan Juli sehingga belum optimal dalam melakukan penyerapan anggaran pada kegiatan operasional wilayah kerja pada BPTD Kelas II Kalimantan Utara. 5. Adanya penyerahan tui keselamatan dan keamanan dari perhubungan darat ke perhubungan laut sehingga mengurangi jumlah operasional satuan kerja pada BPTD Kelas II Kalimantan Utara	Kepala Balai
2	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlingkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlingkapan Jalan Prioritas Nasional	IKK3.1 Persentase perlingkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Perlingkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	9	90%	1.456.968.150	100%	8	1.680.041.972	89%	115%	TERCAPI	1. Menginventarisir kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang 4. Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal dan tanpa ada gangguan	Kepala Balai
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Pelayanan keselamatan Transportasi Jalan	1	100	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM TERLAKSANA	Akan dilaksanakan Pekan Keselamatan Jalan terdapat Efisiensi Anggaran sehingga kegiatan tidak akan dilaksanakan.	Kepala Balai
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	80%	1.100.000.000	100%	1	1.089.997.800	100%	99%	TERCAPI	Kegiatan Sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan kontrak yang telah dibuat	Kepala Balai
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	6	100%	329.707.490	100%	6	612.054.055	100%	186%	TERCAPI	1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 6. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas, dan Angkutan 7. Adanya input mengenai Efisiensi dan Penghematan anggaran sehingga dapat mengurangi penyerapan anggaran yang akan dilakukan. 8. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan berjalan secara baik.	Kepala Balai
4	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	1	100%	1.535.927.957	100%	1	1.942.379.338	100%	126%	TERCAPI	Kegiatan yang terdapat dalam sub ini yaitu kegiatan operasional perkantoran. Kegiatan ini tercapai karena operasional kantor berjalan dengan lancar.	Kepala Balai

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN DESEMBER

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		% Capaian Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	%	%	%			
1	563 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	BOX1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	5	90%	838.406.997	100%	5	923.356.997	100%	110%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 5 trayek yang beroperasi di tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis jalan berhenti sementara. Kegiatan operasional sampai bulan ini sudah berjalan dengan normal.	Kepala Balai
		BOX1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.3 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani subsidi Angkutan Antarmoda	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Barang	1	90%	1.232.123.090	100%	1	1.262.193.090	100%	102%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan barang bagi masyarakat guna meningkatkan Distribusi barang dan meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Trayek kegiatan perintis angkutan barang 2025 masih sama dengan tahun 2024 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis angkutan barang berhenti dan pada bulan Maret sudah beroperasi seperti biasa.	Kepala Balai
		BOX1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Layanan Angkutan Perintis Penyeberangan	2	90%	3.369.639.819	100%	2	6.375.368.141	100%	189%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan perintis penyeberangan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 2 trayek yang beroperasi di tahun 2025 sama dengan tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran akan tetapi pada bulan Maret sudah mulai operasional seperti biasa. Realisasi Anggaran memiliki deviasi yang tinggi dengan target penyerapan dikarenakan adanya addendum kontrak yang disebabkan oleh Load Factor yang menyebabkan pendapatan dari kapal meningkat sehingga mengurangi nilai dalam termin yang akan diupayakan. Kegiatan masih berjalan dengan normal dan beroperasi sesuai dengan target.	Kepala Balai
		BOX1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan SDP	IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	11	100%	325.500.461	100%	11	27.968.000	100%	0%	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SDP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDP 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan 4. Realisasi anggaran sangat kurang dikarenakan adanya realokasi anggaran dari Ditjen Hubdat pada bulan Juli sehingga belum optimal dalam melakukan penyerapan anggaran pada kegiatan operasional wilayah kerja pada BPTD Kelas II Kalimantan Utara. 5. Adanya penyerahan tuis keselamatan dan keamanan dari perhubungan darat ke perhubungan laut sehingga mengurangi jumlah operasional satuan kerja pada BPTD Kelas II Kalimantan Utara 6. Terdapat anggaran blokir pada kegiatan ini target anggaran merupakan total semua anggaran yang ada termasuk dengan anggaran yang terblokir, anggaran blokir pada kegiatan ini yaitu Rp. 213.020.000 7. Penyerapan Anggaran pada Bulan Desember yaitu sudah 99,60 % sehingga anggaran dari kegiatan sudah tercapai.	Kepala Balai
2	564 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	BOX1.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	IKK1.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	9	90%	3.995.558.278	100%	8	3.094.666.863	89%	77%	TERCAPAI	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang 4. Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal dan tanpa ada gangguan 5. Terdapat anggaran blokir pada kegiatan ini target anggaran merupakan total semua anggaran yang ada termasuk dengan anggaran yang terblokir, anggaran blokir pada kegiatan ini yaitu Rp. 705.000.000 6. Penyerapan Anggaran pada Bulan Desember yaitu sudah 99,93% sehingga anggaran dari kegiatan sudah tercapai.	Kepala Balai
		BOX1.5 Jumlah masyarakat yang sosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	IKK1.5 Jumlah masyarakat yang sosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Pelayanan keselamatan Transportasi Jalan	1	100	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM TERLAKSANA	Akan dilaksanakan Pekan Keselamatan Jalan terdapat Efisiensi Anggaran sehingga kegiatan tidak akan dilaksanakan.	Kepala Balai
		BOX7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	0%	1.100.000.000	0%	1	9.157.500	0%	0%	TERCAPAI	1. Kegiatan Sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan kontrak yang telah dibuat 2. Target Anggaran Merupakan Anggaran yang terkena Blokir yaitu sebesar Rp. 1.100.000.000	Kepala Balai

3	565 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	806A.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Dijen Hubdat	806A.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Dijen Hubdat	6	100%	5.015.714.524	100%	6	412.094.365	100%	8%	TERCAJAI	1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Anglutan 3. Monitoring Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 6. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas, dan Anglutan 7. Adanya laporan mengenai Efisiensi dan Penghematan anggaran sehingga dapat mengarahkan penyesuaian anggaran yang akan dilakukan. 8. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan berjalan secara baik. 9. Terdapat anggaran blokir pada kegiatan ini target anggaran merupakan total semua anggaran yang ada termasuk dengan anggaran yang terblokir. anggaran blokir pada kegiatan ini yaitu Rp. 3.802.935.000 10. Penyerapan Anggaran pada Bulan Desember yaitu sudah 99,74% sehingga anggaran dan kegiatan sudah mencapai.	Kepala Balai
4	561 Meningkatnya Birokrasi Dijen Perhubungan Darat Akuntabel	8061 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	8061 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	1	100%	4.941.781.586	100%	1	2.836.742.707	100%	57%	TERCAJAI	1. Kegiatan yang terdapat dalam sub ini yaitu kegiatan operasional perkantoran. Kegiatan ini tercapai karena operasional kantor berjalan dengan lancar. 2. Terdapat anggaran blokir pada kegiatan ini target anggaran merupakan total semua anggaran yang ada termasuk dengan anggaran yang terblokir. anggaran blokir pada kegiatan ini yaitu Rp. 1.343.468.000 3. Penyerapan Anggaran pada Bulan Desember yaitu sudah 98,09% sehingga anggaran dan kegiatan sudah mencapai. 4. Terdapat sisa anggaran Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp. 240.441.100	Kepala Balai



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI